



LAPORAN TAHUNAN



2022

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, Indonesia 92716

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dengan baik, sesuai *time schedule* yang telah direncanakan.

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Laporan ini menggambarkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A selama tahun 2022, meliputi keadaan perkara dan penyelesaian perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta pengawasan.

Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional, para pegawai serta tenaga honorer atas keterlibatan, kerja keras, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, namun atas kerjasama yang baik dari semua pihak, laporan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

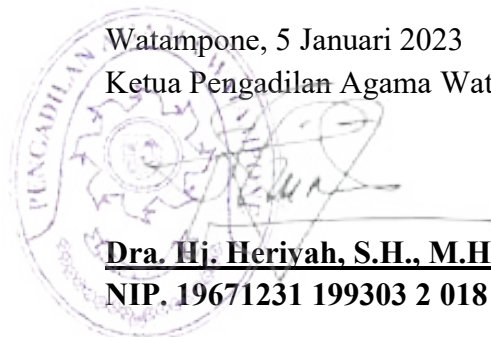
Dengan demikian semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur serta evaluasi pekerjaan kami di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya.

Watampone, 5 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Watampone

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

NIP. 19671231 199303 2 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA	
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	5
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	7
B. Penyelesaian Perkara	8
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	8
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	9
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
Banding, Kasasi, dan PK	10
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi.....	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	11
1. Posbakum	11
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	13
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	15
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	16
1. Mutasi	22
2. Promosi	24
3. Pensiun.....	25
4. Diklat	25
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI.....	28
A. Pengelolaan Keuangan	28
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33

C. Pengelolaan Teknologi Informasi	38
1. Implementasi e-Court	38
2. Implementasi SIPP	41
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	44
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	44
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	45
C. Inovasi Pelayanan Publik	48
BAB VI PENGAWASAN	57
A. Internal	57
B. Evaluasi	59
BAB VII PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi	61
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Matrik Keadaan Perkara pada Wialayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022.....	5
Tabel 2.2	Jumlah Perkara yang diputus Tahun 2022	6
Tabel 2.3	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022.	6
Tabel 2.4	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022. .	7
Tabel 2.5	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022.....	7
Tabel 2.6	Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2021	8
Tabel 2.7	Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2021	8
Tabel 2.8	Rentang Waktu Penyelesaian Perkara	9
Tabel 2.9	Data Pelaksanaan Mediasi	10
Tabel 2.10	Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)	12
Tabel 2.11	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling.....	13
Tabel 2.12	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu.....	14
Tabel 2.13	Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo	15

BAB III

Tabel 3.1	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan / Golongan.....	16
Tabel 3.2	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	19
Tabel 3.3	Daftar Mutasi Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone	23
Tabel 3.4	Daftar Promosi Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone	24
Tabel 3.5	Daftar Pensiun Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone	25
Tabel 3.6	Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2022	26

BAB IV

Tabel 4.1	Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2022.....	32
Tabel 4.2	Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone.....	33
Tabel 4.3	Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone	33
Tabel 4.4	Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone	34
Tabel 4.5	Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Watampone	35
Tabel 4.6	Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah.....	38
Tabel 4.7	Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022.....	40
Tabel 4.8	Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2022	41

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta.....	2
------------	--	---

BAB II

Gambar 2.1	Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara	9
------------	--	---

BAB III

Gambar 3.1	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	18
Gambar 3.2	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	21
Gambar 3.3	Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial	22
Gambar 3.4	Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial	22

BAB IV

Gambar 4.1	Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076.....	32
Gambar 4.2	Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone	42

BAB V

Gambar 5.1	Parkir Khusus Disabilitas....	49
Gambar 5.2	Tampilan Putusan Audio pada Website....	50
Gambar 5.3	Kursi Prioritas dan Space untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu.....	50
Gambar 5.4	Sosialisasi di Kantor Kelurahan.....	51
Gambar 5.5	Alur Pelayanan Prioritas.....	52
Gambar 5.6	Meja Pelayanan Prioritas.....	53
Gambar 5.7	Text to Speech Dalam Persidangan.....	54
Gambar 5.8	Sampel Karcis Prioritas.....	55
Gambar 5.9	Alur Layanan Prioritas	55
Gambar 5.10	Karcis Prioritas Terintegrasi Loker Prioritas.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Watampone merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Watampone berfungsi menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Pengadilan Agama Watampone beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, kelurahan Tibojong, kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa / kelurahan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Ibukota kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis, kabupaten Bone berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Timur : Teluk Bone
- Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.



Gambar 1.1
Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta

Secara astronomis, kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42' -120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan kabupaten Bone beriklim tropis.

Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi Pengadilan Agama Watampone adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Watampone berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Watampone untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator :

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- d. Index kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
- d. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB II

**KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA**

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2021 terdapat 66 sisa perkara yang diproses di tahun 2022. Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 :

Tabel 2.1
Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	1038	1056	33	51 sisa perkara tahun 2021 diputus
2	Cerai Talak	266	268	8	10 sisa perkara tahun 2021 diputus
3	Harta Bersama	4	6	1	3 sisa perkara tahun 2021 diputus
4	Kewarisan	9	10	0	1 sisa perkara tahun 2021 diputus
5	Pengangkatan Anak	0	0	0	-
6	Pengesahan / Itsbat Nikah	616	606	10	-
7	Dispensasi Kawin	36	35	1	-
8	Wali Adhal	1	1	0	-
9	Perwalian	12	12	0	-
10	Penetapan Ahli Waris	59	58	1	-
11	Poligami	4	4	0	-
12	Wakaf	1	1	0	-

13	Lain – lain	34	35	0	1 sisa perkara tahun 2021 diputus
	TOTAL	2080	2092	54	

Tabel 2.2
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	13	114
2	Februari	74	115
3	Maret	96	120
4	April	13	75
5	Mei	38	88
6	Juni	66	149
7	Juli	146	106
8	Agustus	90	118
9	September	71	98
10	Oktober	29	127
11	Nopember	37	141
12	Desember	27	141
	Total	700	1392

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 sebanyak 11 perkara, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	960/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	1181/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	11 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
4	1070/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	14 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama

5	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	13 April 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
6	163/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	18 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
7	500/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	12 September 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
8	700/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	19 Oktober 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
9	547/Pdt.G/2022/PA.Wtp	04 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
10	780/Pdt.G/2022/PA.Wtp	07 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
11	1095/Pdt.G/2022/PA.Wtp	29 Desember 2022	Proses Tingkat Pertama

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2022, terdapat 3 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Januari 2022	Putus, batalkan Putusan Tingkat Banding
2	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp	18 April 2022	Proses Tingkat Kasasi
3	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp	03 Agustus 2022	Proses Tingkat Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) pada tahun 2022.

Tabel 2.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	544/Pdt.G/2011/PA.Wtp.	01 Desember 2022

B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a. Perkara Permohonan (Volunter)

Terdapat 12 sisa perkara Permohonan (Volunter) tahun 2021 yang diputus / diselesaikan di tahun 2022. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Pengesahan/Itsbat Nikah	10
2.	Dispensasi Kawin	1
3.	Penetapan Ahli Waris	1
4.	Lain – lain	0
Jumlah		12

b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa perkara Gugatan tahun 2021 sebanyak 42 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	8
2.	Cerai Gugat	33
3.	Harta Bersama	1
4.	Kewarisan	0
Jumlah		42

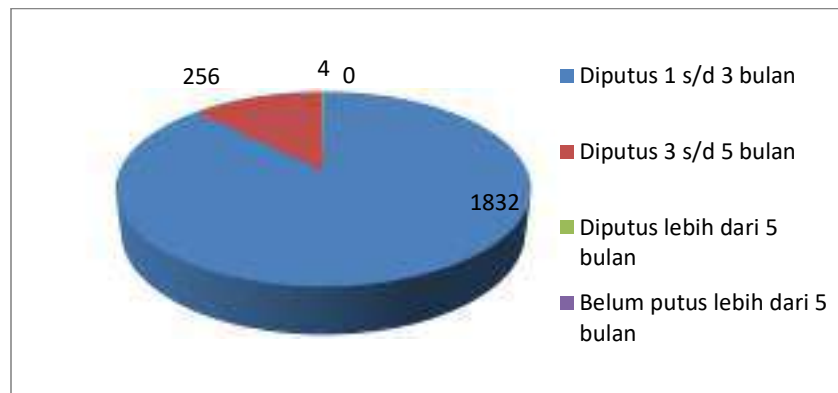
Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus / diselesaikan pada tahun 2022 adalah 54 perkara (12 + 42).

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.8
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	112	14	1	-	
2	Februari	175	14	-	-	
3	Maret	209	6	1	-	
4	April	83	4	1	-	
5	Mei	95	31	-	-	
6	Juni	177	38	-	-	
7	Juli	229	23	-	-	
8	Agustus	194	14	--	-	
9	September	159	10	-	-	
10	Oktober	113	43	-	-	
11	Nopember	154	24	-	-	
12	Desember	132	35	1	-	
	Jumlah	1832	256	4	0	
	Total	2088		4	0	

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) pada tahun 2022 sebanyak 2.088 perkara.



Gambar 2.1
Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Banding

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 sebanyak 11 perkara, dari 2092 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2081 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,47 %.

b. Kasasi

Berdasarkan tabel 2.4, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 sebanyak 3 perkara, dari 2092 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2089 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 99,86 %.

c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2.5, sebanyak 1 perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2022, dari 2092 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 2091 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 99,95 %.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama Watampone tahun 2022 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	19	2	14	3

2	Februari	9	1	0	8
3	Maret	15	2	7	6
4	April	9	0	4	5
5	Mei	8	0	6	2
6	Juni	16	1	12	3
7	Juli	18	1	11	6
8	Agustus	22	0	19	3
9	September	14	2	6	6
10	Oktober	25	1	19	5
11	Nopember	13	1	7	5
12	Desember	9	0	5	4
Jumlah		177	11	110	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2022 hanya 11 perkara.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah salah satu standar dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menetapkan diri untuk menerapkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). SAPM diperlukan untuk mengukur profesionalitas dan transparansi organisasi / satuan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Watampone senantiasa mengacu dan berpedoman pada sertifikasi SAPM yang telah disusun oleh Dirjen Badilag. Pengadilan Agama Watampone berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan.

Berikut ini beberapa kegiatan unggulan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana uraian kegiatan dalam Penetapan Kinerja, yaitu :

1. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan / permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 17 November 2021, Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) sebesar Rp 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) dengan target 700 jam layanan, 700 orang. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Panji sesuai kontrak perjanjian kerjasama Nomor W20-A2/185/PL.08/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.968.000,- (*enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Tabel 2.10
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	0	0,-	0
2	Februari	60	Rp. 3.967.186,-	77
3	Maret	60	Rp. 6.003.255,-	142
4	April	60	Rp. 6.003.255,-	116
5	Mei	60	Rp. 6.003.255,-	54
6	Juni	30	Rp. 6.003.255,-	126
7	Juli	60	Rp. 6.003.255,-	87
8	Agustus	60	Rp. 6.003.255,-	123
9	September	60	Rp. 6.003.255,-	119
10	Oktober	60	Rp. 6.003.255,-	113
11	Nopember	60	Rp. 6.003.255,-	84
12	Desember	121	Rp. 11.971.519,-	54
	Jumlah		Rp. 69.968.000,-	1.095

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.095 perkara yang terlayani dalam 700 jam layanan. Dengan demikian, realisasi kegiatan layanan PosBaKum sebesar 156,43 %, melebihi target.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

a. Sidang di luar gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan atau biasa disebut (sidang keliling), khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Kegiatan sidang di luar gedung bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik dan geografis.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung sejumlah Rp 43.707.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) dengan target 136 perkara, 17 kegiatan.

Tabel 2.11
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Salomekko	2	30	Rp. 5.142.000,-
2	Ulaweng	4	42	Rp. 10.284.000,-
3	Palakka	2	26	Rp. 5.142.000,-
4	Sibulue	2	14	Rp. 5.142.000,-
5	Dua Boccoe	2	15	Rp. 5.142.000,-
6	Barebbo	2	14	Rp. 6.427.500,-
7	Lappariaja	3	30	Rp. 6.427.500,-
	Total	17	171	Rp 43.707.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 171 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 43.707.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling.

b. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan pada tahun 2022 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 160 perkara, 8 kegiatan.

Tabel 2.12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Tanete Riattang Timur	1	44	Rp. 6.300.000,-
2	Libureng	1	33	Rp. 6.300.000,-
3	Lappariaja	1	36	Rp. 6.300.000,-
4	Tellu Siattinge	1	21	Rp. 6.300.000,-
5	Sibulue	1	24	Rp. 6.300.000,-
6	Ajangale	1	21	Rp. 6.300.000,-
7	Dua Boccoe	1	23	Rp. 6.300.000
8	Awangpone	1	25	Rp. 6.300.000
	Total	8	227	Rp. 50.400.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 227 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat Sidang Pelayanan Terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran perkara prodeo pada tahun 2022 sejumlah Rp 19.250.000,- (*sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan target 35 perkara.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan	KET
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	70	Rp. 6.450.000,-	
4	April	2	Rp. 4.500.000,-	
5	Mei	2	Rp. 5.040.000,-	
6	Juni	25	Rp. 960.000,-	
7	Juli	45	Rp. 1.680.000,-	
8	Agustus	25	Rp. 500.000,-	15 Perkara Prodeo Murni
9	September	-	-	
10	Oktober	-	Rp. 120.000,-	
11	Nopember	-	-	
12	Desember	-	-	
	Jumlah	154 (DIPA) + 15 (Prodeo Murni)	Rp. 19.250.000,-	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani pada tahun 2022 sebanyak 154 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.250.000,-. Semua perkara prodeo berhasil diselesaikan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi suatu organisasi dan sangat menentukan keberhasilan tujuan organisasi tersebut. Untuk memperkuat fungsi organisasi pada Pengadilan Agama Watampone, dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional, terutama untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM itu sendiri yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi Pengadilan Agama Watampone perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum, khususnya peradilan agama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan.

Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi dalam penataan manajemen SDM. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatan. Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

Secara umum, SDM peradilan dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah SDM teknis yudisial, terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Kelompok kedua adalah SDM non teknis yudisial, terdiri dari Sekretaris, Kasubbag, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

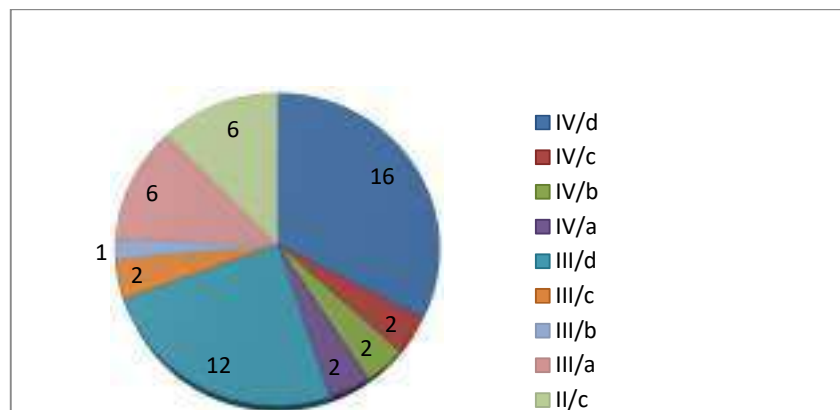
SDM yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No	Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
2	Drs. H. Muh. Yusuf Hs., S.H.	Pembina Utama	Hakim

		Madya, IV/d	
3	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
4	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
5	Drs. H.M. Yunus K., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
6	Drs. Dasri Akil, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
7	Drs. H. M. Tang, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
8	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
9	Drs. H. M. Suyuti, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
10	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
11	Dra. H. Idris, M.H.I.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
12	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
13	Dra. Hj. St. Husnaenah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
14	Dra. Hj. Warni, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
15	Drs. Nurmaali	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
16	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
17	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
18	Drs. Abd. Rahman	Pembina Utama Muda, IV/c	Hakim
19	Lukman Patawari, S.H.	Pembina Tk.I, IV/b	Panitera
20	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris
21	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
22	Haris, S.H.I., M.Sy.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti
23	Bintang, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Permohonan
24	Hayad Jusa, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum
25	Andi Suardi, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan
26	Dra. Hj. Rosmini	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
27	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
28	Hj. Kartini, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
29	Siti Jamilah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
30	Dra. Hj. Samsang	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
31	Hj. Asmah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Organisasi

			Dan Tata Laksana
32	Hj. Fitriani, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
33	Muhammad Suardi, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Juru Sita
34	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan
35	Muhammad Syahrani, S.H.	Penata, III/c	Juru Sita
36	Maryati M, S.H.	Penata, III/c	Panitera Pengganti
37	Ridmajayanti, S.Sos.	Penata Muda Tk. I, III/b	Juru Sita
38	Heriawati, S.H.	Penata Muda, III/a	Juru Sita
39	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P.	Penata Muda, III/a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
40	Panggih Tridarma, S.Kom.	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer
41	Fathur Razak, S, Sy.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
42	Nur Fauzi Radhatul Fatah, S.HI	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
43	Breend Benny Dharmawan, S.E.	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
44	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Pengatur, II/c	Arsiparis
45	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara
46	Herdha Rahma Anugrah. A.Md. Ak	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara
47	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengatur, II/c	Pengelola Perkara Panmud Gugatan
48	Nurul Indaryana Wahid, A.Md. A.B.	Pengatur, II/c	Pengelola Perkara Panmud Gugatan
49	Metria Dwi Virahesti, A.Md, A.B.	Pengatur, II/c	Pengelola Perkara Panmud Gugatan



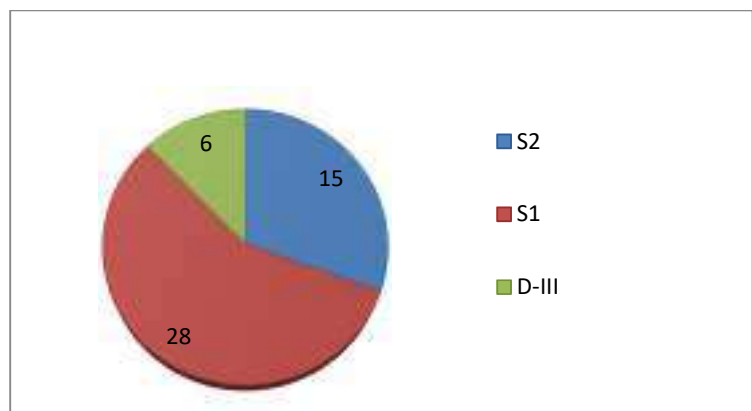
Gambar 3.1
Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 3.2
Matriks Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Nama	Pendidikan Terakhir		Jabatan
		Tingkat Ijazah	Tempat Pendidikan	
1	Drs. H. M. Tang, S.H., M.H.	S2	Universitas Hasanuddin	Hakim
2	Drs. H. M. Suyuti, M.H.	S2	Universitas Islam Jakarta	Hakim
3	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	S2	Universital 45 Makassar	Ketua
4	Hadrwati, S.H., M.H.I.	S2	UIN Alauddin Makassar	Wakil Ketua
5	Drs. M. Yunus, K. M.H.	S2	Universitas 45 Makassar	Hakim
6	Dra. Hj. Siti Amirah, M.H.	S2	Universitas Cendrawasih Jayapura	Hakim
7	Dra. Hj. Warni, M.H.	S2	IAIN Alauddin Makassar	Hakim
8	Dra. Hj. Siti Husnaenah, M.H.	S2	IAIN Palopo	Hakim
9	Drs. H. Idris. M.H.I.	S2	IAIN Makassar	Hakim
10	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	S2	UMI Makassar	Hakim
11	Drs. H. Jabbar, M.H.	S2	Universitas Indonesia Timur Makassar	Hakim
12	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	S2	UMI Makassar	Sekretaris
13	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	S2	STAIN Watampone	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
14	Haris, S.H.I., M.Sy.	S2	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
15	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	S2	UIN Alauddin Makassar	Panitera Pengganti
16	Lukman Patawari, S.H.	S1	UMI Makassar	Panitera
17	Drs. H. Muh.Yusuf Hs., S.H.	S1	Universitas Satria Makassar	Hakim
18	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.	S1	STIH Lamaddukelleng Sengkang	Hakim
19	Drs. Dasri Akil, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Hakim
20	Drs. Nurmaali	S1	IAIN Watamppone	Hakim

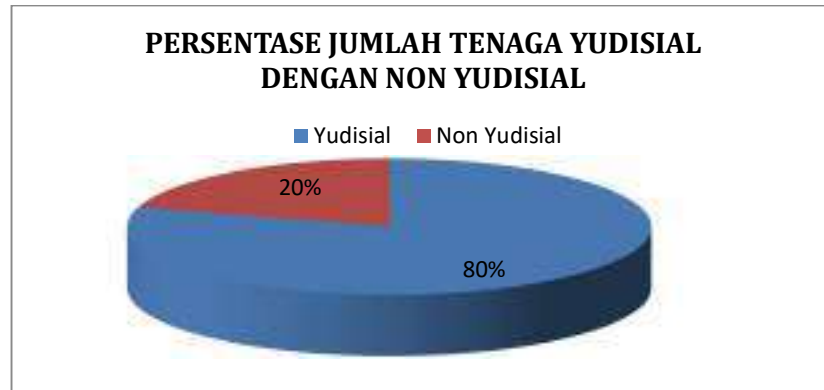
21	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	S1	Universitas Cenderawasih Jayapura	Hakim
22	Drs. Abd. Rahman	S1	Universitas Islam Negeri Sultahn Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Hakim
23	Dra. Hj. Badriyah	S1	Universitas Islam Negeri Sultahan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Hakim
24	Hayad Jusa, S.Ag.	S1	IAIN Watampone	Panmud Hukum
25	Bintang, S.H.	S1	Universitas 45 Makassar	Panmud Permohonan
26	Hj. Asmah, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
27	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	S1	UIN Alauddin Makassar	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
28	Dra. Hj. Rosmini	S1	IAIN Alauddin Watampone	Panitera Pengganti
29	Siti Jamillah, S.H.	S1	UMI Makassar	Panitera Pengganti
30	Andi Suardi, S.Ag.	S1	STAIN Watampone	Panmud Gugatan
31	Hj. Kartini, S.H.	S1	Universitas Muhammadiyah Palu	Panitera Pengganti
32	Hj. Fitriani, S.Ag.	S1	UMI Makassar	Panitera Pengganti
33	Dra. Hj. Samsang	S1	IAIN Watampone	Panitera Pengganti
34	Maryati M, S.H	SI	UNHAS	Panitera Pengganti
35	Muhammad Suardi, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
36	Muhammad Syahrani, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
37	Ridmajayanti, S.Sos.	S1	STIA Puangrimag- galatung	Juru Sita
38	Heriawati, S.H.	S1	STIH Pengayoman Watampone	Juru Sita
39	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P.	S1	Universitas Brawijaya	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
40	Panggih Tridarma, S.Kom.	S1	Universitas Diponegoro	Pranata Komputer.
41	Fathur Razak, S.Sy.	S1	STAIN	Analisis Perkara

			Watampone	Peradilan
42	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	S1	Universitas Darussalam Gontor	Analisis Perkara Peradilan
43	Breend Benny Dharmawan, S.E.	S1	Universitas Stikubank Semarang	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
44	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Arsiparis Pelaksana
45	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	D-III	Universitas Jenderal Sudirman	Pengelola Barang Milik Negara
46	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Pengelola Perkara Panmud Gugatan
47	Nurul Indaryana Wahid, A.Md, A.B.	D-III	Politeknik Informatika Nasional Mksr	Pengelola Perkara Panmud Gugatan
48	Metria Dwi Virahesti A,Md. A.B.	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Pengelola Perkara Panmud Gugatan
49	Herdha Rahma Anugrah, A.Md, Ak.	D-III	Universitas Diponegoro	Pengelola Barang Milik Negara

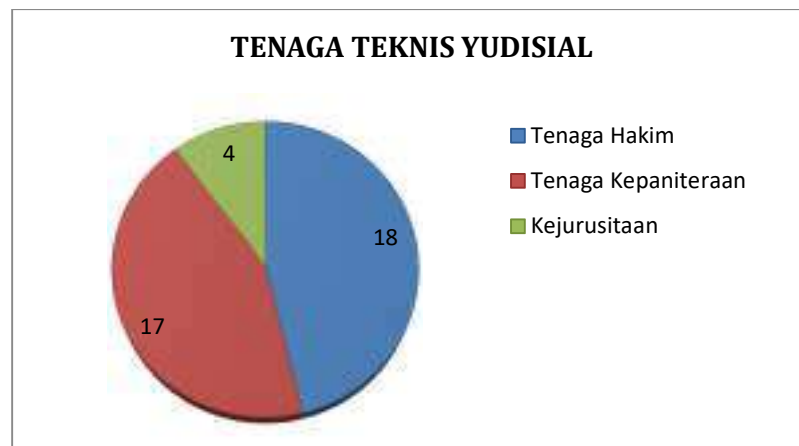


Gambar 3.2
Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam periode tahun 2022, sesuai perkembangan struktur organisasi Peradilan Agama, keadaan SDM teknis yudisial dan non teknis yudisial di Pengadilan Agama Watampone adalah terdapat 18 orang Hakim, 17 orang Kepaniteraan dan 4 orang Juru Sita, serta Kesekretariatan sebanyak 10 orang. Adapun perkembangan SDM pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3.3
Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial



Gambar 3.4
Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial

1. Mutasi

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi, jabatan, tempat maupun pekerjaan yang dilakukan, baik secara horisontal maupun vertikal dalam suatu organisasi. Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung terhadap SDM, khususnya pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan SDM karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mutasi ini juga menjadi stimulus bagi SDM untuk meningkatkan kinerjanya, dan bagi Pengadilan Agama Watampone berguna untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan komposisi pekerjaan / jabatan.

Perkembangan mutasi tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Mutasi Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. H. Muhammadong	Hakim PA Watampone	Hakim Tinggi PTA Papua Barat
2	Dra. Hj. Dzakiyyah	Hakim PA Watampone	Hakim Tinggi PTA Sulawesi Barat
3	Drs. H. Rahmading, M.H.	Panitera PA Watampone	Panitera PTA Papua Barat
4	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Jombang
5	Dra. St. Mahdianah K, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Mojokerto
6	Dra. Hunaena, M.H,	Panitera Pengganti PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar
7	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	Ketua PA Watampone	Ketua PA Pinrang
8	Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Watampone	Ketua PA Sengkang
9	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Ketua PA Palu	Ketua PA Watampone
10	Agustiawati, S.E., S.H.	Jurusita PA Watampone	Panitera Pengganti PA Watansoppeng
11	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	Hakim PA Maros	Hakim PA Watampone
12	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.	Hakim PA Majene	Hakim PA Watampone
13	Hj. Naimah Nurdin, S.Ag, Lc., M.Th.I.	Panitera Pengganti PA Masamba	Panitera Pengganti PA Watampone
14	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, S.H., M.H.	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone
15	Muhammad Surur, S.Ag.	Ketua PA Sengkang Kelas IB	Wakil Ketua PA Watampone Kelas IA.
16	Maryati M. S.H.	Panitera Pengganti PA Barru	Panitera Pengganti PA Watampone
17	Muniroh Nahdi, S.H., M.H	Sekretaris PA Makassar	Sekretaris PA Watampone

18	Muhammad Surur, S.Ag	Wakil Ketua PA Watampone	Wakil Ketua PA Makassar
19	Dra. Hj. Ernawati, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Mataram
20	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si.	Sekretaris PA Watampone	Sekretaris PA Makassar
21	Hadrawati, S.Ag., M.H.I	Wakil Ketua PA Gorontalo	Wakil Ketua PA Watampone
22	Dra. Hj. Warni, M.H.	Hakim PA Jayapura	Hakim PA Watampone
23	Lukman Patawari, S.H.	Panitera PA Sengkang	Panitera PA Watampone
24	Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PA Makassar
25	Drs. M.Yunus K., S.H., M.H.	Hakim PA Jember	Hakim PA Watampone
26	Drs. H. Idris, M.HI.	Hakim PA Kab. Kediri	Hakim PA Watampone
27	Dra. Hj. Munirah	Panitera Muda Gugatan PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar.

2. Promosi

Promosi merupakan suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status yang lebih tinggi. Landasan para pengambil kebijakan memberi promosi kepada pegawai tertentu adalah kepercayaan terhadap kejujuran, kemampuan/kompetensi dan kecakapan pegawai tersebut. Tujuan Mahkamah Agung memberikan promosi pada SDM Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar sehingga dapat menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi dan status sosial yang semakin tinggi. Selain itu untuk memotivasi pegawai yang menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi tersebut.

Tabel 3.4
Daftar Promosi Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Drs. H. Muhammadong, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim PTA Papua Barat
2	Drs. H. Rahmading, M.H.	Panitera PA Watampone	Panitera PTA Papua Barat

3	Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.	Hakim PA Watampone	Hakim Tinggi PTA Sulawesi Barat
4	Agustiawati, SE., S.H.	Jurusita PA Watampone	Panitera Pengganti PA Watansoppeng
5	Dra. Hj. Munirah	Panitera Muda Gugatan PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar.
6	Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.HI.	Hakim PA Watampone	Wakil Ketua PA Watansoppng
7	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Watampone	Ketua PA Sengkang
8.	Dra. Hunaena, M.H.	Panitera Pengganti PA Watampone	Panitera Pengganti PTA Makassar
9.	Andi Suardi, S.Ag.	Panitera Pengganti PA Watampone.	Panitera Muda Gugatan PA Watampone
10	Hayad Jusa, S.Ag.	Panitera Pengganti PA Sengkang	Panitera Muda Hukum PA Watampone.
11	Hj. Naimah Nurdin S.Ag., Lc., M.Thi.	Panitera Pengganti PA Masamba	Panitera Pengganti PA Watampone

3. Pensiun

Pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Pada tahun 2022, terdapat pegawai maupun hakim Pengadilan Agama Watampone yang memasuki usia pensiun.

Tabel 3.5
Daftar Pensiun Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. Jamaluddin	Panitera Muda Hukum PA Watampone	Pensiun
2	Hj. ST. Aisyah S, S.H.	Hakim PA Watampone	Pensiun

4. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Tujuan dilaksanakannya program diklat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.

Tabel 3.6
Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2022

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Lama Diklat
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Bintek Kepaniteraan Administrasi Peradilan Agama	15 Juni 2022 s/d 17 Juni 2022
2	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Micro Learning Overvicw Laporan Keuangan	21 Februari s/d 20 Maret 2022.
3	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Intera atas Pelaporan Keuangan	28 Maret s/d 1 April 2022
4	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online Diklat Penyelenggara Reformasi Birokrasi.	24 Oktober s.d 28 Oktober 2022.
5	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pelatihan Online E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri .	21 Nopember s.d 20 Desember 2022.
6	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Champion Meeting – Court Excellence Training	13 s/d 17 Januari 2022.
7	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	E-Learning PPSPM Angkatan IV Tahun 2022	23 Mei s/d 7 Juni 2022.
8	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Seminar Digital Kemenkeu Corpu Talk “Crash Program Keringanan Utang : Ayo urus keringanan utang! Lunas hari ini, lega sampai nanti”	15 September 2022
9	Hakim Wahyu Ramadhana, SE.	Pelatihan Online Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia	19 Juli 2022
10	Hakim Wahyu Ramadhana, SE.	Seminar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7 Nopember 2022
11	Panggih Tridarma, S. Kom	Pelatihan TOEFL ITP	10 Juli 22
12	Panggih Tridarma, S.Kom.	Pelatihan Online Webinar urgensi Pelaksanaan Pengujian Keamanan Sistim Organik di Era Tranformasi Digital.	2 Nopember 2022
13	Rofika Khoiritun Nisa, A.Md.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Ang I tahun 2022	8 Maret s.d 11 Maret 2022.
14	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Bimbingan dan Konsultasi Teknis Sumber Daya Manusia Kearsipan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.	5 April s.d 7 April 2022.

15	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	E-Learning Bendahara Penerima Angkatan III.	4 Juli s.d 11 Juli 2022.
16	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	E- Learning Bendahara Pengeluaran	17 Mei s.d 24 Mei 2022.
17	Nurul Indaryana Wahid, A.Md. A.B.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII tahun 2022	5 September s/d 19 Nopember 2022
18	Metria Dwi Virahesti, A.M.d. A.B.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII tahun 2022	5 September s/d 19 Nopember 2022
19	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII tahun 2022.	5 September s/d 19 Nopember 2022.
20	Herdha Rahma Anugrah, A.Md. Ak.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII tahun 2022.	5 September s/d 19 Nopember 2022.
21	Breend Benny Dharmawan, S.E.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III tahun 2022	29 Agustus s/d 12 Nopember 2022.
22	Fathur Razak, S.Sy.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III tahun 2022	29 Agustus s/d 12 Nopember 2022.
23	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III tahun 2022	29 Agustus s/d 12 Nopember 2022.

Peningkatan kualitas SDM secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 13.537.916.000,- (*tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 222.553.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Selama tahun anggaran 2022 telah dilakukan revisi DIPA 307509 sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 14 Februari 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 11 April 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 13 Mei 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 13 Juli 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 5) Revisi V tanggal 25 September 2022 tentang pemutakhiran KPA.
- 6) Revisi VI tanggal 10 Oktober 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 7) Revisi VII tanggal 2 November 2022 perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (penambahan anggaran belanja pegawai dan langganan listrik).
- 8) Revisi VIII tanggal 29 November 2022 tentang pemutakhiran KPA.
- 9) Revisi VIII tanggal 26 Desember 2022 tentang pemutakhiran KPA.

Selama tahun anggaran 2022 telah dilakukan revisi DIPA 309076 sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 14 Februari 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 6 April 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.

- 3) Revisi III tanggal 13 Mei 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 13 Juli 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 5) Revisi V tanggal 11 Oktober 2022 tentang perubahan halaman III DIPA.

Program - program pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 :

1. Program Dukungan Manajemen:

a. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

- 1) Pagu Rp 11.654.642.000,- (Setelah revisi)
- 2) Realisasi Rp 11.642.774.259,- (99,90 %)
- 3) Sisa Rp 11.867.741,- (0,10 %)

b. Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

- Pagu Rp 1.765.274.000,- (Setelah revisi)
- Realisasi Rp 1.765.261.332,- (99,9993 %)
- Sisa Rp 12.668,- (0,0007 %)

c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- Pagu Rp 118.000.000,-
- Realisasi Rp 117.992.500,- (99,99 %)
- Sisa Rp 8.000,- (0,01 %)

Komponen yang terdapat pada program ini terdiri dari :

1. Komponen 051 (Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah) :
 - A. Penanganan Covid-19
 - B. Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
2. Komponen 001 (Gaji dan Tunjangan)
3. Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) :
 - A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran :
 - 1) Belanja Keperluan Perkantoran
 - Jasa Satpam, Supir dan Pramubakti
 - Langganan Surat Kabar
 - Air Minum/Galon
 - Penjilidan/Cetak/Cek
 - 2) Belanja Barang Operasional lainnya

- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya
- 3) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
- B. Langganan Daya dan Jasa :
- 1) Belanja Keperluan Perkantoran
- Langganan Lisensi Video Conference
 - Langganan Internet
- 2) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- 3) Langganan Listrik
- 4) Langganan Telepon
- 5) Langganan Air (PDAM)
- 6) Belanja Sewa (Sewa Web Hosting)
- C. Pemeliharaan Kantor :
- 1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Pagar Kantor
 - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rumah Dinas
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Scanner
 - Pemeliharaan CCTV
 - Pemeliharaan Printer
 - Pemeliharaan P.C.
 - Pemeliharaan Laptop/Notebook
 - Bahan Bakar Genset
 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
 - Pemeliharaan Genset
 - Pemeliharaan A.C. Split
- D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional :
- 1) Belanja Keperluan Perkantoran : Pakaian Dinas CPNS, Pakaian

Dinas Pegawai non Hakim, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti.

2) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja : Honor Pengelola PNBP, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor PPSPM, Honor KPA, Honor Staf Pengelola Keuangan.

E. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim :

1) Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

F. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan :

1) Kudapan/Snack

2) Bahan/Spanduk/Dokumentasi

G. Rapat Koordinasi Internal

1) Kudapan/Snack

H. Konsultasi ke Tingkat Banding

1) Perjalanan Dinas Biasa

I. Konsultasi ke KANWIL / KPKNL

1) Perjalanan Dinas Biasa

J. Penanganan Covid-19

1) Vitamin/Masker/Hand Sanitizer

4. Komponen 052 (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)

A. Pengadaan Alat Pengolah Data

1) PC Kepaniteraan

2) Printer

Pelaksanaan anggaran tahun 2022 DIPA 307509 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena adanya sisa anggaran Belanja Pegawai, dan akun tersebut tidak bisa digeser ke akun lain sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 99,91 %.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Belanja Barang DIPA BADILAG / 309076)

Program penegakan dan pelayanan hukum ini hasilnya adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Watampone.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pemberian bantuan pembebasan biaya perkara, operasional Pos Bantuan Hukum, pelaksanaan sidang diluar gedung dan sidang pelayanan terpadu.

Tabel 4.1
Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2022

No	Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Rapat Koordinasi Teknis Penyelsaian Perkara	Rp 39.196.000,-	Rp 39.195.870,-	Rp 130,-
2	Pos Bantuan Hukum	Rp 70.000.000,-	Rp 69.968.000,-	Rp 32.000,-
3	Pembebasan Biaya Perkara	Rp 19.250.000,-	Rp 19.250.000,-	0,-
4	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp 43.707.000,-	Rp 43.707.000,-	0,-
5	Layanan Sidang Terpadu	Rp 50.400.000,-	Rp 50.400.000,-	0,-
	Total	Rp 222.553.000,-	Rp 222.520.870,-	Rp 32.130,-



Gambar 4.1
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076

Adapun Belanja Barang dari DIPA 309076 berhasil mencapai realisasi sebesar 99,99 %, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo melebihi target (35 perkara), yaitu 154 perkara. Kegiatan Sidang Diluar Gedung sebanyak 17 kegiatan dan Sidang Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebanyak 8 kegiatan berhasil terlaksana semua, serta Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Ada dua jenis kendaraan dinas Pengadilan Agama Watampone, yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Total nilai aset kendaraan dinas jika dinilai dengan hitungan rupiah pada tahun 2022 adalah **Rp 455.024.828** (*empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 4.2
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Kijang Innova	2007		√		
2.	Kijang Avanza	2011		√		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Suzuki Shogun Racing FD 125 XRM	2006		√		
2.	Suzuki Tunder EN 125	2006			√	
3.	Yamaha Jupiter MX 286	2007	√			
4.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
5.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
6.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
7.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
8.	Suzuki Shogun R FL 125 SD	2009	√			

2. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Agama Watampone yang berdiri di atas tanah seluas 1.308 M² merupakan gedung / kantor lama yang telah dilalih fungsikan menjadi rumah dinas.

Tabel 4.3
Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
3.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			

Tanah Bangunan Rumdis seluas	1.308 M2	Rp. 1.406.704.000
Rumah Dinas	449 M2	Rp. 720.981.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 2.127.685.000

Total nilai aset rumah dinas (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.127.685.000,-** (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

3. Bangunan Gedung Kantor

Gedung Pengadilan Agama Watampone yang sekarang ini, diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh DR. H.A. Harifin Tumpa, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI saat itu. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.424 M² dan telah resmi ditempati sejak peresmian.

Tabel 4.4
Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang ATK Perkara	1	
10	Ruang Kesekretariatan	1	
11	Ruang Bendahara	1	
12	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
13	Ruang Pusat PTSP	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Media Center	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Juru Sita	1	
19	Ruang Arsip Perkara	1	
20	Ruang Laktasi	1	

21	Toilet Umum	4	
22	Ruang Tunggu Persidangan	1	
23	Ruang Posbakum	1	
24	Ruang TI	1	
25	Pos Keamanan	2	
26	Mushollah	1	
27	Tempat Parkiran	2	
	Jumlah	36	

Tanah Bangunan Kantor seluas	3.424 M2	Rp. 3.832.124.000
Gedung dan Bangunan Kantor	1.823 M2	Rp. 6.095.150.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 9.927.274.000

Total nilai aset Bangunan Gedung Kantor (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 9.927.274.000,-** (*sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

4. Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Total nilai aset sarana / prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.711.214.068,-** (*dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah*).

Rincian jumlah sarana dan prasarana Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	B	RR	RB	Keterangan
1	Lemari Besi/Metal	69	69	-	-	
2	Lemari kayu	6	5	1	-	
3	Rak Besi	1	1	-	-	
4	Rak kayu	2	-	2	-	
5	Filling Kabinet Besi	1	1	-	-	

6	Brandkas	2	2	-	-	
7	Tabung Pemadam	5	5	-	-	
8	CCTV	1	1	-	-	
9	Papan Visual	4	3	1	-	
10	Mesin Antrian	1	1	-	-	
11	Mesin Absensi	1	1	-	-	
12	Perkakas Kantor Lainnya	1	1	-	-	
13	Meja kerja kayu	64	64	-	-	
14	Kursi Besi/Metal	161	161	-	-	
15	Kursi Kayu	12	12	-	-	
16	Sice	5	4	1	-	
17	Meja Rapat	2	2	-	-	
18	Meja Telpon	1	1	-	-	
19	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
20	Sketsel	2	2	-	-	
21	Kursi Tunggu	7	7	-	-	
22	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-	
23	Lemari Es	6	6	-	-	
24	A.C. Split	19	18	1	-	
25	Kipas Angin	1	1	-	-	
26	Kompor Gas	1	-	1	-	
27	Tabung Gas	1	1	-	-	
28	Televisi	6	6	-	-	
29	Loudspeaker	4	4	-	-	
30	Microfon	7	7	-	-	
31	Standing Bracket TV	1	1	-	-	
32	Taplak Meja	1	1	-	-	
33	Audio Mixing	1	1	-	-	
34	LCD Monitor	1	1	-	-	
35	Camera Conference Webcam	1	1	-	-	
36	Lambang Garuda Pancasila	2	-	2	-	
37	Gambar Presiden/Wapres	2	-	2	-	
38	Tiang Bendera	6	6	-	-	
39	Tangga Aluminium	1	1	-	-	
40	Kaca Hias	6	6	-	-	
41	Mimbar/Podium	1	1	-	-	
42	Palu Sidang	2	-	2	-	
43	Lambang Instansi	1	1	-	-	
44	Gordyn/Kray	1	1	-	-	
45	Asbak Tinggi	4	4	-	-	
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	7	-	-	
47	Telephon (PABX)	1	1	-	-	

48	Pesawat Telepon	1	1	-	-	
49	Genset	1	1	-	-	
50	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-	
51	P.C. Unit	32	32	-		
52	Laptop	31	31	-	-	
53	Printer	9	8	1		
54	Scanner	1	1	-	-	
55	Server	2	2	-	-	
56	Router	3	3	-	-	
57	Rak Server	2	2	-	-	
58	Kabel UTP	3	3	-	-	
59	Wireless Access Point	2	2	-	-	
60	Switch	6	6	-	-	
61	Monografi	444	444	-	-	
	Jumlah	973	959	14		

Sarana / prasarana fasilitas kantor secara keseluruhan berjumlah 973 unit, dengan rincian 959 unit dalam kondisi baik, dan 14 unit rusak ringan.

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran pengadaan untuk peralatan dan mesin :

- 1) PC. Kepaniteraan sebanyak 8 unit,
- 2) Printer Kepaniteraan sebanyak 2 unit.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone mendapat anggaran untuk belanja biaya pemeliharaan, berupa :

- 1) Peralatan dan mesin yang meliputi : pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer/PC, AC, CCTV, scanner, genset, laptop/notebook, dan printer.
- 2) Pemeliharaan gedung dan bangunan, meliputi : pemeliharaan pos jaga, pemeliharaan gedung kantor dan halaman.
- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya meliputi : pemeliharaan rumah dinas.

Total aset barang milik negara tahun anggaran 2022 dalam hitungan rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	5.238.828.000,-
2	Peralatan Dan Mesin	2.711.214.068,-
3	Gedung dan Bangunan	7.779.656.000,-
4	Jaringan	19.988.100,-
5	Aset Tetap Lainnya	15.354.679,-
6	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.094.235.721,-)
7	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(872.753.438,-)
8	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.248.063,-)
9	Barang Komsumsi	2.595.400,-
Jumlah		12.797.399.025,-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa total aset negara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 setelah penyusutan adalah **Rp 12.797.399.025,-** (*dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah*).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap pengadilan wajib menggunakan e-Court dalam penerimaan perkara. Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Watampone, dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online.

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi

untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pada e-Litigasi ini, acara persidangan secara elektronik oleh para pihak, dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim / hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis / hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Tabel 4.7
Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022

No	Kategori Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan	9	270	75	195
2	Permohonan	-	88	81	7
	Total	9	358	156	202

Sisa perkara e-Court tahun 2021 sebanyak 9 perkara, dan semuanya sudah diputus. Pada tahun 2022, sebanyak 358 perkara e-Court yang masuk / diterima, tetapi hanya 4 perkara melalui e-Litigasi.

Tabel 4.8
Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tahapan Terakhir
1	1090/Pdt.G/2022/PA.Wtp	23 – 09 – 2022	29 – 12 – 2022, ikrar talak
2	418/Pdt.G/2022/PA.Wtp	23 – 03 – 2022	16 – 01 – 2023, ikrar talak
3	1155/Pdt.G/2022/PA.Wtp	12 – 10 – 2022	22 – 12 – 2022, pembuktian rekonvensi
4	1242/Pdt.G/2022/PA.Wtp	04 – 11 – 2022	22 – 12 – 2022, duplik tergugat

2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi SIPP merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara.

Kemudahan penyediaan informasi perkara tidak terlepas dari peran aplikasi SIPP yang telah terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Watampone, sehingga informasi perkara yang sangat dibutuhkan seperti progres suatu perkara, jadwal sidang, dan informasi status perkara dapat diperoleh dengan mudah.

Aplikasi SIPP telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pengadilan Agama Watampone, mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penetapan Hari Sidang, relaas panggilan, keuangan perkara, pembuatan jadwal sidang, Berita Acara Sidang, hingga produk pengadilan (Putusan/Penetapan dan Akta Cerai).

Selain mengoptimalkan peran website yang terintegrasi dengan SIPP, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan SIPP adalah :

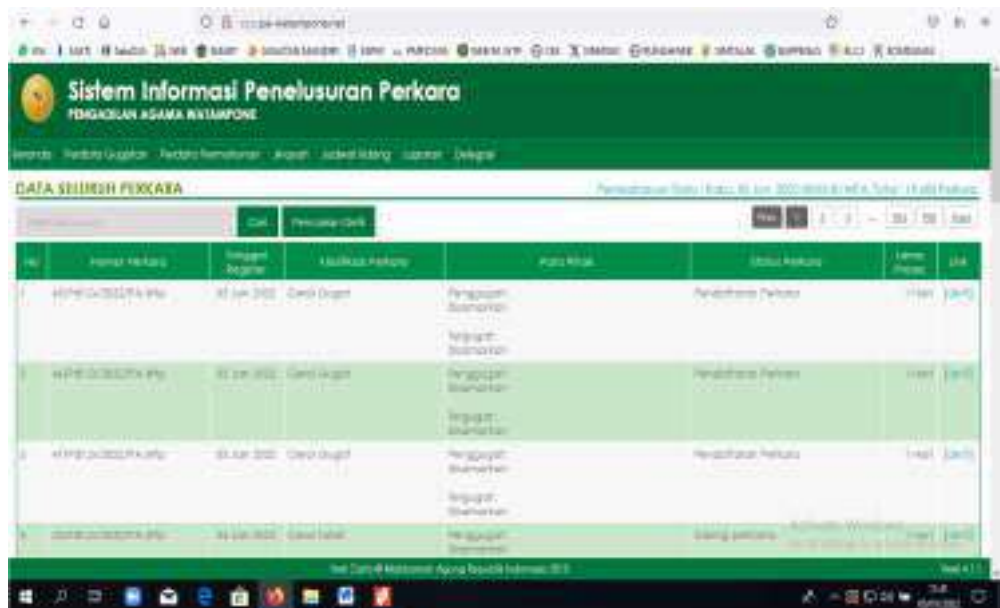
a. SMS Gateway

Pihak berperkara dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara praktis dengan mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan dan akan mendapatkan balasan secara otomatis.

b. SIPANGGI (Sistem Informasi Panggilan Ghaib)

Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dapat mengetahui informasi jadwal sidang.

- c. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)
aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya.
- d. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)
Sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Aplikasi Notifikasi Perkara (ATIKA)
Sarana pemberitahuan notifikasi seputar perkara untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Pihak dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor yang terdaftar.
- f. Aplikasi Layanan Informasi Virtual (ALIV)
Layanan whatsapp bot yang diperuntukan untuk masyarakat atau pihak berperkara agar dapat memperoleh informasi atau bertanya seputar informasi perkara. ALIV akan membalas secara otomatis jika pesan sesuai dengan format yang ditentukan.



The screenshot displays the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (SIPP) web application for the Pengadilan Agama Watampone. The interface includes a header with the system name and a navigation menu. Below the header, there is a section titled 'DATA SIHRESH PERKARA' which contains a table of case data. The table has columns for 'No', 'Nomor Perkara', 'Tanggal Register', 'Kategori Perkara', 'Pihak Pihak', 'Status Perkara', 'Jenis Perkara', and 'Link'. The table lists several cases, each with a unique identifier, registration date, category, parties, status, and type. The interface also includes a search bar and a 'Filter' button.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Kategori Perkara	Pihak Pihak	Status Perkara	Jenis Perkara	Link
1	44/Pdt.G/2022/Pa.Wat	01 Jan 2022	Garda Dugut	Pengguna: Bismillah Pengguna: Bismillah	Pengadilan Perkara	11/01	Link
2	44/Pdt.G/2022/Pa.Wat	01 Jan 2022	Garda Dugut	Pengguna: Bismillah Pengguna: Bismillah	Pengadilan Perkara	11/01	Link
3	44/Pdt.G/2022/Pa.Wat	01 Jan 2022	Garda Dugut	Pengguna: Bismillah Pengguna: Bismillah	Pengadilan Perkara	11/01	Link
4	44/Pdt.G/2022/Pa.Wat	01 Jan 2022	Garda Dugut	Pengguna: Bismillah Pengguna: Bismillah	Pengadilan Perkara	11/01	Link

Gambar 4.2
Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone

Aplikasi SIPP yang terpasang di Pengadilan Agama Watampone sekarang adalah versi 5.1.0. Dengan diterapkannya aplikasi SIPP, maka publikasi perkara diharapkan dapat dilaksanakan secara *one day publish* yaitu perkara yang diproses pada hari itu dapat langsung dipublikasikan pada hari tersebut, serta minutasasi berkas perkara dalam satu hari (*one day minutation*).

Adapun beberapa strategi yang ditempuh dalam implementasi program *one day minutation* dan *one day publish* adalah sebagai berikut :

a. Penyeragaman Format

Penyeragaman format yang digunakan dari awal sampai akhir proses persidangan mutlak diperlukan, meliputi penyeragaman gaya selingkung format surat Gugatan atau Permohonan (penulisan identitas, posita dan petitum), penyeragaman template BAS dan Putusan / Penetapan.

b. Peran Aktif Petugas Meja I dan Meja II

Petugas Meja I adalah pintu masuk seseorang beracara di Pengadilan. Dimana ia bertugas untuk menerima gugatan atau permohonan seseorang. Untuk efisiensi dan efektifitas proses selanjutnya, Petugas Meja I harus melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam surat gugatan atau permohonan yang diajukan.

Petugas Meja II merupakan pintu masuk data gugatan dan permohonan ke dalam aplikasi SIPP. Data yang *diinput* pertama kali, akan menentukan proses selanjutnya.

c. Adanya Koordinasi yang Baik antar Pihak Terkait dengan Perkara

Misalnya adanya koordinasi antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

d. Mempersiapkan Segala Sesuatunya dari Awal Sebelum Perkara Diputus

Untuk mengejar target *one day minutation* dan *one day publish*, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan sebelum persidangan dilakukan. Hal-hal seperti penyusunan jadwal sidang, penyusunan dan pengecekan berkas, pengecekan relaas panggilan, cetak instrumen panggilan atau instrumen pemberitahuan, pencetakan BAS sebelumnya, dan hal lainnya yang dibutuhkan, harus telah dipersiapkan sebelum sidang. Begitu juga dengan kegiatan yang pasti dilakukan setelah persidangan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Terdapat 7 (tujuh) area yang menjadi tolak ukur penilaian, yaitu :

1. Kepemimpinan (leadership)
2. Perencanaan strategis (strategic planning)
3. Fokus pelanggan (customer focus)
4. Dokumen system (document system)
5. Manajemen sumber daya (resources management)
6. Proses manajemen (process management)
7. Hasil kerja (performance result).

Akreditasi yang diberikan oleh Dirjen Badilag adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen Peradilan Agama yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi Dirjen Badilag terhadap semua Peradilan Agama di Indonesia.

SAPM merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor peradilan untuk melakukan perubahan / peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan. Tujuan SAPM adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima, sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022, pelaksanaan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi pada surat

Direktur Jenderal Nomor: 3862/DjA/HM.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara integritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan / pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan.

Program PTSP terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai peradilan Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pada PTSP Pengadilan Agama Watampone telah ditempatkan petugas layanan di loket-loket, di mana para pihak pencari keadilan dapat meminta layanan dan informasi. Bahkan juga telah ditempatkan petugas Bank BRI sebagai wujud layanan kepada masyarakat guna menerima panjar biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot dan jauh untuk menyetor biaya panjar perkara ke bank.

1. Layanan Pokok PTSP

a. Layanan Informasi / Pengaduan

1) Layanan Informasi

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi, baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melayani permohonan informasi, baik yang diajukan secara lisan atau tulisan.

2) Layanan Pengaduan

Petugas pengaduan melayani pengaduan, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis.

a) Pengaduan secara Lisan :

- Menghadap langsung petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Watampone pada jam kerja, mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WITa.
- Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif).

b) Pengaduan secara tertulis :

- Menyampaikan / mengirim surat resmi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan cara :
 - Diantar langsung
 - Melalui Pos
 - Melalui E-mail: pawatampone1a@gmail.com
 - Melalui aplikasi SIWAS MA RI
- Menyertakan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

b. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- 1) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- 2) Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;

- 3) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi;
- 4) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi;
- 5) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- 1) Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- 2) Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- 3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 4) Pengembalian Sisa Panjar (PSP) Biaya Perkara;
- 5) Penyerahan bukti-bukti Pembayaran;
- 6) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan, yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Layanan Penunjang PTSP

a. Layanan Posbakum

Layanan Posbakum meliputi Konsultasi Hukum dan bantuan pembuatan Surat Gugatan atau Permohonan bagi Pencari Keadilan.

b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

Untuk sistem pembayaran biaya perkara, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal, yaitu PT BRI Cabang Watampone dengan System Payment Point yang ada lingkungan PTSP itu sendiri.

c. Layanan Materai dan Legalisir atau Nazzeglen

Untuk sistem layanan materai dan legalisir atau nazzeglen, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT POS Cabang Watampone.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan / masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama Watampone. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat.

Saat ini inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi keharusan sebagai alat penunjang pelayanan publik. Dukungan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang juga semakin modern dalam menggunakan media elektronik, memacu Pengadilan Agama Watampone melakukan terobosan inovasi pelayanan publik.

Sebelum tahun 2022, Pengadilan Agama Watampone telah menerapkan inovasi berupa SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan), SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan), dan SIMAPAN (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran).

Sedangkan pada tahun 2022, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan peningkatan kinerja bagi pegawai Pengadilan Agama Watampone, maka berikut ini beberapa inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut :

1. Area Drop Zone Dan Parkir Khusus Disabilitas

Dalam upaya menerapkan pelayanan yang prima dan dapat memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas di Pengadilan Agama Watampone dengan baik, disediakan area drop zone dan parkir khusus disabilitas yang sesuai dengan anjuran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Area parkir khusus disabilitas ini berada dekat dengan akses masuk ke Gedung pelayanan di Pengadilan Agama Watampone dan bersebelahan dengan area drop zone agar memudahkan penyandang disabilitas memarkirkan kendaraannya ketika berada di Pengadilan Agama

Watampone. Area parkir khusus disabilitas diberi warna biru dan symbol parkir khusus disabilitas agar pengunjung Pengadilan Agama Watampone yang bukan merupakan penyandang disabilitas tidak memarkirkan kendaraannya di area tersebut.



Gambar 5.1
Parkir Khusus Disabilitas

2. Putusan Audio

Salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone yaitu pemberian fasilitas salinan putusan format audio bagi penyandang disabilitas tuna netra. Salinan putusan format audio dibuat menggunakan aplikasi *text to speech* yang dikonversi ke dalam bentuk audio. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah pihak berperkara tuna netra untuk mengetahui isi salinan putusannya.

Salinan putusan format audio akan diupload pada website Pengadilan Agama Watampone dengan identitas yang disamarkan guna melengkapi website Pengadilan Agama Watampone yang ramah disabilitas dalam bentuk menu. Menu tersebut berisi nomor perkara, jenis perkara dan audio yang berisi salinan putusan format audio yang telah disamarkan. Sedangkan salinan putusan format audio yang tidak disamarkan akan dikirimkan kepada pihak berperkara tuna netra dengan melalui link yang dikirimkan ke nomor *whatsapp* pihak bersangkutan.

 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLASIA PUTUSAN FORMAT AUDIO RAMAH DIFABEL TUNANETRA				
No	Nomor Putusan	Jenis Putusan	Estimasi	Audio
1.	787/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Ceset Tindak	—	▶ 00:18:40 —▶ 🔊
2.	803/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Ceset Tindak	—	▶ 00:28:34 —▶ 🔊
3.	811/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Isbat Nisab	—	▶ 00:22:36 —▶ 🔊
4.	812/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Isbat Nisab	—	▶ 00:16:00 —▶ 🔊
5.	821/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Dipernahi Kasih	—	▶ 00:26:27 —▶ 🔊
6.	821/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Dipernahi Kasih	—	▶ 00:26:13 —▶ 🔊
7.	830/Pdt.G/2022/Pk.Wyo	Pemotongan Akr Wara	—	▶ 00:17:28 —▶ 🔊

Gambar 5.2
Tampilan Putusan Audio pada Website

3. Kursi Prioritas

Inovasi yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone, khususnya di ruang tunggu telah tersedia kursi prioritas (priority seats) untuk masyarakat pencari keadilan khususnya untuk bagi kelompok rentan, seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, usia lanjut (lansia) dan ibu menyusui.



Gambar 5.3
Kursi Prioritas dan Space untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu

Dengan tersedianya kursi prioritas (priority seats) diharapkan dapat membantu dan memberi kemudahan akses bagi kelompok rentan, yaitu dekat dengan meja layanan prioritas dan dekat diruang siding. Dan juga dapat memberi nilai plus bagi Pengadilan Agama Watampone karena telah tersedia fasilitas pendukung bagi kelompok rentan, dan dapat meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan.

4. Sosialisasi Pelayanan Prima

Dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu adanya informasi yang tidak hanya mudah dipahami oleh masyarakat umum, namun juga kepada pihak pencari keadilan berkebutuhan khusus. Pengadilan Agama Watampone sebagai instansi yang mendukung aksesibilitas kelompok rentan dan disabilitas, berupaya agar informasi pelayanan dapat tersebar luas dengan baik. Dengan adanya media informasi seperti *banner* sebagai bukti bahwa Pengadilan Agama Watampone adalah instansi yang ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas, brosur tentang alur pelayanan PTSP dan Ruang Sidang yang memiliki akses QR Code audio dapat dan adanya video informasi yang memiliki akses juru bahasa memudahkan pihak pencari keadilan yang kesulitan untuk membaca, isyarat dapat memudahkan masyarakat penyandang tuna rungu dan tuna wicara.



Gambar 5.4
Sosialisasi di Kantor Kelurahan

Penyebaran informasi tidak hanya dilakukan di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Watampone, tetapi juga adanya sosialisasi secara langsung di beberapa kantor kelurahan, dan juga video informasi yang

diunggah di beberapa *platform* seperti Facebook, Instagram, dan Youtube. Dengan adanya informasi pada media-media tersebut, diharapkan agar mampu membantu masyarakat umum dan juga pihak pencari keadilan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah.



Gambar 5.5
Alur Pelayanan Prioritas

5. Loket Pelayanan Prioritas

Salah satu inovasi pelayanan publik oleh Pengadilan Agama Watampone yaitu dengan tersedianya loket prioritas bagi kaum rentan dan disabilitas. Adapun kategori yang mendapatkan layanan tersebut yaitu

penyandang disabilitas, ibu hamil/ menyusui, dan manula (umur 60 tahun ke atas). Adapun pelayanan yang diberikan di loket tersebut yaitu dari mulai proses pembuatan gugatan/permohonan sampai dengan pengambilan produk. Selain itu, untuk mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada tiga kategori yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama Watampone juga menyediakan kartu antrian prioritas dan kursi tunggu prioritas. Dengan adanya loket prioritas ini diharapkan dapat mendukung misi dari Pengadilan Agama Watampone yaitu memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.



Gambar 5.6
Meja Pelayanan Prioritas

6. Text To Speech Dalam Persidangan

Salah satu inovasi yang berhasil dikembangkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah penyediaan sarana pembantu komunikasi bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara selama persidangan yang perlu dihadapinya.

Inovasi ini berbasis *text to speech* dengan fitur *speech recognition* yang berkerja dengan mengonversi suara ke teks. Lebih lanjut, sarana ini mendukung komunikasi dua arah secara live. Pembicara akan berbicara menggunakan mic yang mana input suara akan dikonversikan kepada teks

kemudian ditampilkan di layar LED. Penyandang tuna rungu yang telah membaca hasil pembicaraan di layar LED akan membalas dengan mengetik tanggapannya. Adapun bagi pengandang tuna wicara dapat menyatakan maksudnya dengan cukup mengetik. Semua hasil ketikan akan tampak juga di layar LED bersama hasil konversi suara ke teks.

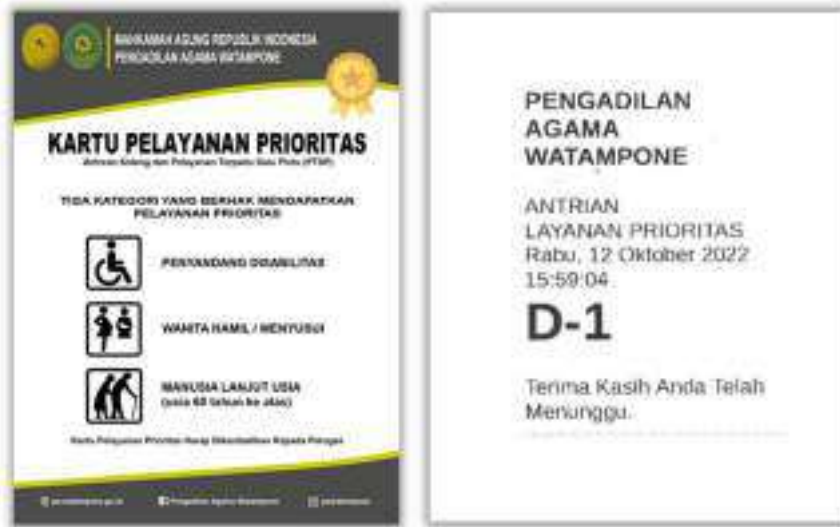


Gambar 5.7
Text to Speech Dalam Persidangan

Dengan adanya sarana ini diharapkan kendala dan hambatan komunikasi yang sebelumnya dihadapi dapat diatasi dan menjadikan jalannya persidangan lebih kondusif ke depannya.

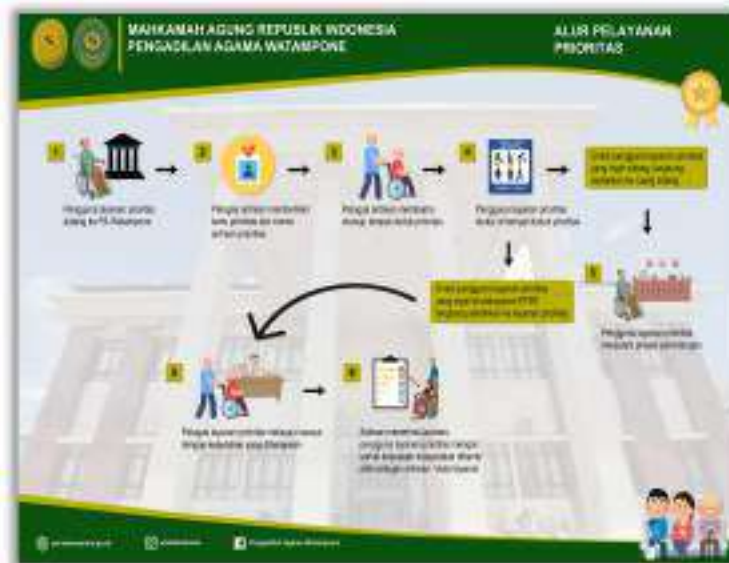
7. Karcis Pelayanan Prioritas

Pengadilan Agama Watampone terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dalam rangka penguatan kualitas pelayanan sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Pengadilan Agama Watampone telah menerapkan pelayanan prioritas antrean sidang dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan ini diterapkan untuk merespon tuntutan publik terkait pelayanan khusus yang berkeadilan bagi yang memerlukan perhatian khusus dari setiap penyelenggara pelayanan publik.



Gambar 5.8
Sampel Karcis Prioritas

Pelayanan prioritas ini ditujukan kepada tiga kategori kelompok yang secara langsung berhak mendapatkan pelayanan prioritas antrian sidang dan PTSP, adapun tiga kategori tersebut adalah penyandang disabilitas, ibu hamil / menyusui, dan manula (umur 60 tahun ke atas). Nantinya masyarakat pencari keadilan yang termasuk dalam tiga kategori tersebut akan diprioritaskan untuk mendapatkan layanan sesuai yang mereka butuhkan. Berikut prosedur alur pelayanan prioritas antrian sidang dan PTSP :



Gambar 5.9
Alur Layanan Prioritas

Nantinya masyarakat pencari keadilan yang termasuk dalam tiga kategori tersebut akan mendapatkan kartu pelayanan prioritas dan nomor antrian layanan prioritas sebagaimana berikut :



Gambar 5.10
Karcis Prioritas Terintegrasi Loker Prioritas

Diharapkan dengan adanya pelayanan prioritas antrean sidang dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan khususnya bagi penyandang disabilitas, ibu hamil / menyusui, dan manula (umur 60 tahun ke atas) dalam menerima layanan pada Pengadilan Agama Watampone yang ramah, efisien, dan cepat.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para peradilan. Tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, terkandung pula di dalamnya aspek pengawasan.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan peradilan, dalam melakukan pengawasan Internal berpedoman kepada :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan,
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan keputusan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Watampone selaku pimpinan tertinggi pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai. Karena peningkatan

kualitas Aparatur Sipil Negara sangat penting, pengawasan diperlukan untuk membina sikap dan perilaku disiplin, loyalitas, bertanggung jawab, jujur, dan selalu mengembangkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kinerja yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat. Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendukung peningkatan tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus terhadap hakim dan pegawai.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif,
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/135/PS.00/SK/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, yang meliputi berbagai bidang,
3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui :
 - a. Eksaminasi Putusan
 - b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim).

Pengawasan yang dilakukan HaWasBid untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HaWasBid yang ditunjuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Koordinator Pengawas, diteruskan ke pimpinan serta dilaporkan pada aplikasi Kinsatker setiap tiga bulan.

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W-20-A2/135/PS.00/XII/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone :

Tabel 6.1
Hakim Pengawas Bidang

No	Bidang Pengawasan	Nama/ NIP	Sekretaris
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin

1.	Manajemen Peradilan	Drs. H. Kamaluddin, S.H. NIP. 19580324 198703 1 004	Zelvyana
		Drs. H. M. Suyuti, M.H. NIP. 19571231 198103 1 069	Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Dra. Hj. Badriyah, S.H. NIP. 19581231 198203 2 021	Imelda Machmud
		Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	A. Achmad Husain
		Drs. H. Muh Yusuf HS, S.H. NIP. 19580506 197803 1	Hamdany Asis
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. Nurmaali NIP. 19571231 198103 1 069	Sri Astuti Darwis
		Drs. H. Idris, M.H.I NIP. 19581231 198503 1 051	Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. NIP. 19621229 199103 2 004	A Ulfyah Nur
		Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	Satriani
		Dra. Hj. Sitti Amirah NIP. 19611002 198803 2 001	Ahmad Amiruddin
5.	Kinerja pelayanan publik	Drs. H. Muh. Tang, M.H. NIP. 19581231 198703 1 030	Dyta Nurul Yunus
		Drs. Abd. Rahman NIP. 19571231 199203 1 012	Iriani
		Dra. Hj. Warni, M.H. NIP. 19650727 199401 2 001	Hermawati

B. Evaluasi

Pelaporan, rekomendasi dan tindak lanjut seluruh hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone, baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, para Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan penanganan yang terbaik terhadap sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan agar dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan oleh stakeholder di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk rapat evaluasi menyeluruh. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor dan di saat jam kerja;
- Konsistensi penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasir dan user SIPP lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Implementasi aplikasi e-Court dan 26 (dua puluh enam) aplikasi Inovasi Ditjen Badilag;
- Peningkatan kinerja seluruh hakim dan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- Peningkatan ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam pembuatan laporan, dan pemberkasan perkara Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali.
- Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2022 adalah 97,48%, dengan perhitungan perkara diterima tahun 2022 sejumlah 2.080 perkara ditambah perkara sisa tahun 2021 sejumlah 66 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2022 sejumlah 2.146 perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 2.092 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2022 sejumlah 54 perkara (2,52 %).
2. Penyerapan anggaran DIPA Satker 307509 tahun 2022 sebesar 99,91 %. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan program Dukungan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik;
3. Penyerapan anggaran DIPA Satker 309076 tahun 2022 sebesar 99,99 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Penegakan Dan Pelayanan Hukum telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan tugas peradilan sesuai ketentuan.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya penambahan pegawai untuk Pengelola perpustakaan, Petugas meja informasi, dan Juru Sita,
2. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan dan motifasi pegawai dengan memperbanyak Diklat bagi pegawai sesuai dengan sasarannya,
3. Sangat diperlukan peningkatan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar Pengadilan Agama Watampone dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan,

4. Perlu adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi / baik.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



SK TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/136/SK/OT.01.1/XII/2022

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/004/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TAHUN 2022.

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;
Kedua : Tugas Tim adalah :
a. Menginventarisir dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari sub-sub Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2022 sesuai outline.
c. Laporan dibuat dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai jadwal yang ditetapkan.
Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 15 Desember 2022

Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 19671231 199303 2 018

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Nomor : W20-A2/134/SK/OT.01.1/XII/2022

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Penanggungjawab : Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. (Ketua)
Koordinator : Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (Wakil Ketua)
Ketua : Lukman Patawari, S.H. (Panitera)
Sekretaris : Muniroh Nahdi, S.H., M.H. (Sekretaris)
Anggota : Hayad Jusa, S.Ag. (Panitera Muda Hukum)
Andi Suardi, S.Ag. (Panitera Muda Gugatan)
Bintang, S.H. (Panitera Muda Permohonan)
Maftukhah Mustafa, S.Kom. (Kasubbag. Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan)
Nurhidayah, S.Ag. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)
Hj. Asmah, S.H. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P (Analis Kepegawaian Ahli Pertama)
Breend Benny Dharmawan, S.E. (CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan)

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 15 Desember 2022

Ketua



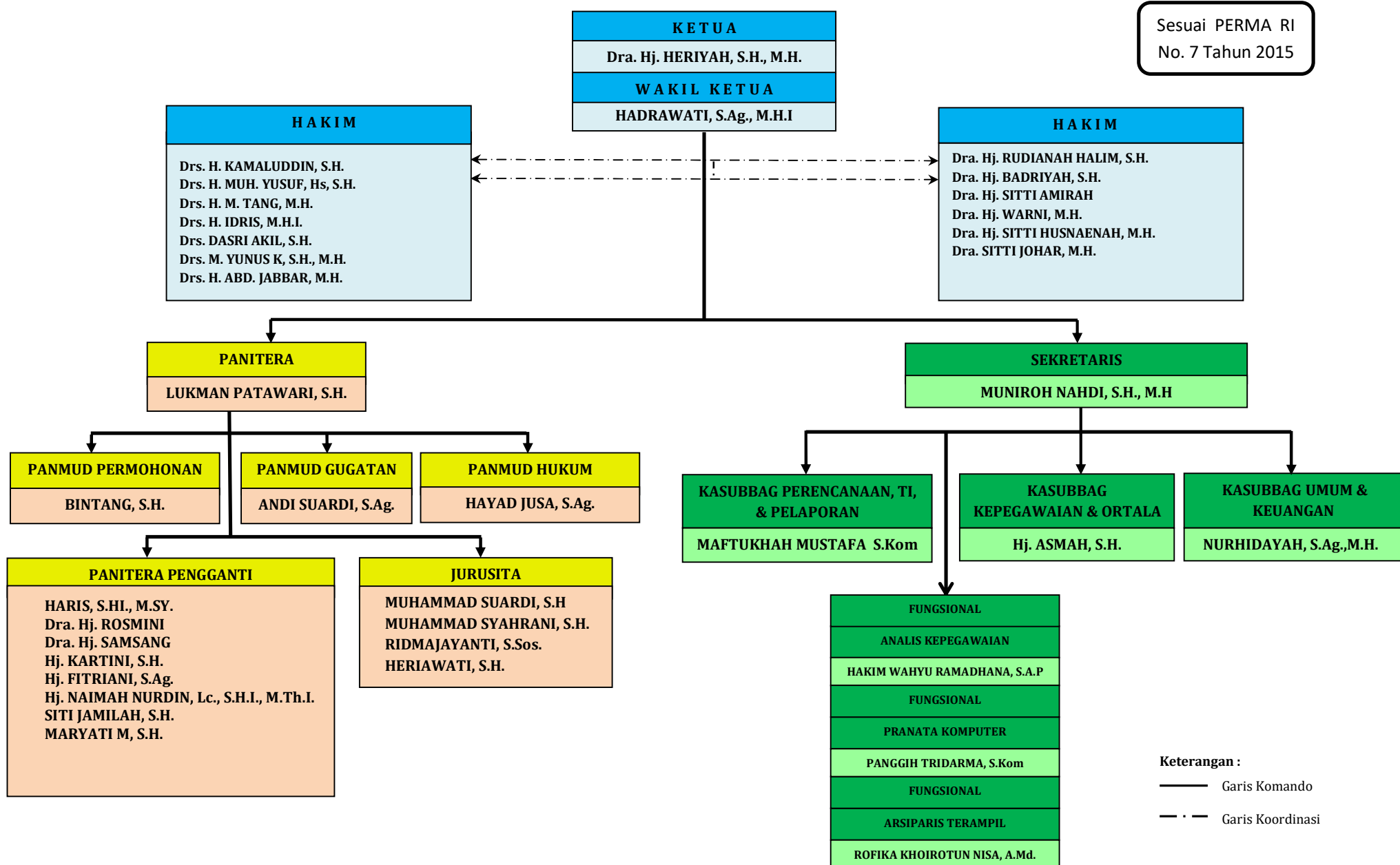
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 19671231 199303 2 018

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



DAFTAR BEZETTING

DATA BEZETTING PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2022

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. 196712311993032018	Pembina Utama Madya IV/d	2021-10-01	00077/KEP/AA/1500 1/21	Ketua Pengadilan	2022-08- 31	248/KMA/SK/VIII/2 022	S-2
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. 197301311998022003	Pembina Utama Muda IV/c	2022-04-01	00013/KEP/AA/1500 1/22	Wakil Ketua Pengadilan	2022-12- 07	339/KMA/SK/XI/20 22	S-2
3	Muniroh Nahdi, S.H., M.H. 196712101999032003	Pembina Tingkat I IV/b	2020-10-01	572/SEK/Kp.I/SK/VIII/ 2020	Sekretaris	2022-08- 15	979/SEK/Kp.I/SK/VII /2022	S-2
4	Lukman Patawari, S.H. 196907181998031003	Pembina IV/a	2021-04-01	1152/DJA/KP.04.1/SK /3/2021	Panitera	2022-12- 07	3062/DJA/KP.04.6/ SK/11/2022	S-1
5	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H. 195805061978031001	Pembina Utama Madya IV/d	2016-10-01	00795/KEP/AA/1300 1/16	Hakim	2020-07- 03	25/KMA/SK/II/2020	S-1
6	Drs. H. Idris, M.H.I. 195812311985031051	Pembina Utama Madya IV/d	2019-04-01	00050/KEP/AA/1500 1/19	Hakim	2022-02- 25	36/KMA/SK/I/2022	S-2
7	Drs. H. M. Tang, M.H. 195812311987031030	Pembina Utama Madya IV/d	2018-10-10	00147/KEP/AA/1500 1/18	Hakim	2018-09- 05	138/KMA/SK/VIII/2 018	S-2
8	Drs. H. Kamaluddin, S.H. 195803241987031004	Pembina Utama Madya IV/d	2019-04-01	00050/KEP/AA/1500 1/19	Hakim	2021-08- 27	154/SK/KMA/VIII/2 021	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Drs. Dasri Akil, S.H. 195912311988031027	Pembina Utama Madya IV/d	2018-10-01	00109/KEP/AA/1500 1/18	Hakim	2019-05- 28	74/KMA/SK/IV/201 9	S-1
10	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. 196212291991032004	Pembina Utama Madya IV/d	2018-04-01	00036/KEP/AA/1500 1/18	Hakim	2018-03- 09	25/KMA/SK/I/2018	S-1
11	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. 196112311991031014	Pembina Utama Madya IV/d	2020-10-01	00072/KEP/AA/1500 1/20	Hakim	2022-12- 07	339/KMA/SK/XI/20 22	S-2
12	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. 196408201991031004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim	2022-01- 28	36/KMA/SK/I/2022	S-2
13	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. 196911241994032004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim	2022-01- 28	36/KMA/SK/I/2022	S-2
14	Dra. Hj. Warni, M.H. 196507271994012001	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00012/KEP/AA/1500 1/22	Hakim	2022-02- 11	36/KMA/SK/I/2022	S-2
15	Dra. Hj. Sitti Amirah, 196602121994012001	Pembina Utama Madya IV/d	2022-03-16	00022/KEP/AA/1500 1/22	Hakim	2020-08- 31	181/KMA/SK/VII/20 20	S-2
16	Dra. Sitti Johar, M.H. 196607211994032002	Pembina Utama Madya IV/d	2022-10-01	00119/KEP/AA/1500 1/22	Hakim	2022-08- 29	248/KMA/SK/VIII/2 022	S-2
17	Dra. Hj. Badriyah, S.H. 195812311982032021	Pembina Utama Muda IV/c	2019-04-01	00050/KEP/AA/1500 1/19	Hakim	2021-08- 27	154/KMA/SK/VIII	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Hayad Jusa, S.Ag. 196708011992031003	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	2766/DJA/KP.04.1/SK /08/2016	Panitera Muda Hukum	2022-07- 25	1385/DjA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
19	Bintang, S.H. 197009121992031004	Penata Tingkat I III/d	2012-10-01	392/SEK/KP.01/SK/9/ 2012	Panitera Muda Permohonan	2020-11- 03	2140/DJA/KP.04.6/ SK/9/2020	S-1
20	Andi Suardi, S. Ag. 197311052001121001	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0324/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Panitera Muda Gugatan	2022-08- 15	1960/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
21	Nurhidayah, S.Ag., M.H. 197807052002122001	Pembina IV/a	2018-04-01	443/SEK/Kp.I/SK/VI/2 019	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2017-03- 06	5A/SEK/KP.I/SK/III/ 2017	S-2
22	Hj. Asmah, S.H. 196611271987032001	Penata Tingkat I III/d	2015-04-01	W20- A/18/KP.04.1/III/201 5	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	2017-03- 06	5A/SEK/KP.I/SK/III/ 2017	S-1
23	Maftukhah Mustafa, S.Kom. 198603242011012014	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W20- A/115/KP.04.1/SK/III/ 2021	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	2017-03- 06	5A/SEK/KP.I/SK/III/ 2017	S-1
24	Haris, S.H.I., M.Sy. 197304051998031004	Pembina IV/a	2020-10-01	1479/DjA/KP.04.1/SK /9/2020	Panitera Pengganti	2017-11- 16	1388/DJA/KP.04.6/ SK/10/2017	S-2
25	Hj. Kartini, S.H. 196304211988022001	Penata Tingkat I III/d	2016-04-01	1286/DJA/KP.04.1/SK /4/2016	Panitera Pengganti	2020-03- 09	905/DjA/KP.04.6/S K/II/2020	S-1
26	Dra. Hj. Rosmini, 196704121994032002	Penata Tingkat I III/d	2006-04-01	UP.IV/1651/SEK/SK2 006	Panitera Pengganti	2011-05- 05	0605/DJA/KP.04.6/ SK/III/2011	S-1
27	Siti Jamila, S.H. 196707282000122001	Penata Tingkat I III/d	2013-04-01	0499/DjA/KP.04.1/SK /II/2013	Panitera Pengganti	2013-08- 23	0997/DJA/KP.04.6/ SK/V/2013	S-1
28	Hj. Fitriani, S.Ag. 197410172001122002	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0327/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Panitera Pengganti	2021-05- 31	1685/DjA/KP.04.6/ SK/5/2021	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Dra. Hj. Samsang, 196812312003122002	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	311 Tahun 2019	Panitera Pengganti	2016-11- 29	3188/DjA/Kp.04.6/ SK/10/2016	S-1
30	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I. 198209182009122003	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	1018/DjA/KP.04.1/SK /3/2022	Panitera Pengganti	2020-03- 16	851/DjA/KP.04.6/S K/II/2020	S-2
31	Maryati M, S.H. 198601232012122004	Penata III/c	2021-04-01	892/DjA/KP.04.1/SK/ 2/2021	Panitera Pengganti	2022-07- 25	1968/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
32	Muhammad Suardi, S.H. 196607091994031004	Penata Tingkat I III/d	2019-10-01	2763 Tahun 2019	Juru Sita	2008-02- 01	W20- A/184/Kp.07.6/SK/ XII/2007	S-1
33	Muhammad Syahrani, S.H. 197301012006041019	Penata III/c	2019-10-01	2745 Tahun 2019	Juru Sita	2016-08- 09	1907/DjA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
34	Ridmajayanti, S.Sos. 199007092009122001	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	307 Tahun 2019	Juru Sita	2016-08- 09	1905/DjA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
35	Heriawati, S.H. 198510142009122004	Penata Muda III/a	2019-04-01	669 Tahun 2019	Juru Sita	2021-09- 24	2540/DjA/KP.04.6/ SK/9/2021	S-1
36	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P. 199602102019031007	Penata Muda III/a	2019-03-01	958/SEK/CPNS.04.1/S K/II/2019	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2021-01- 29	20/SEK/Kp.I/SK/I/2 021	S-1
37	Panggih Tridarma, S.Kom. 199609022020121004	Penata Muda III/a	2020-12-01	1772/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Pranata Komputer Ahli Pertama	2022-08- 26	1004/SEK/Kp.I/SK/V III/2022	S-1
38	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H. 199504222022031006	Penata Muda III/a	2022-03-01	1663/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perkara Peradilan	2022-03- 01	1663/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	S-1
39	Fathur Razak, S.Sy 199310092022031005	Penata Muda III/a	2022-03-01	1662/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perkara Peradilan	2022-03- 01	1662/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	S-1
40	Breend Benny Dharmawan, S.E. 199008052022031004	Penata Muda III/a	2022-03-01	3049/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perencanaan,	2022-03- 01	3049/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Evaluasi dan Pelaporan			
41	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md. 199510162020122008	Pengatur II/c	2020-12-01	1773/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Arsiparis Pelaksana	2022-08- 26	1009/SEK/Kp.I/SK/V III/2022	D-III
42	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md. 199505022020121004	Pengatur II/c	2020-12-01	1774/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Pengelola Barang Milik Negara	2021-12- 01	W20- A/196/KP.00.3/SK/ XII/2021	D-III
43	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak 199905302022032008	Pengatur II/c	2022-03-01	1664/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Barang Milik Negara	2022-03- 01	1664/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	D-III
44	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md 199608272022032015	Pengatur II/c	2022-03-01	3050/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Perkara	2022-03- 01	3050/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	D-III
45	Nurul Indryana Wahid, A.Md.A.B. 199808032022032012	Pengatur II/c	2022-03-01	3051/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Perkara	2022-03- 01	3051/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	D-III
46	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B. 199905182022032012	Pengatur II/c	2022-03-01	3052/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Perkara	2022-03- 01	3052/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	D-III

Bone, 04 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.,
NIP. 196712311993032018



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



DATA KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1900 **BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN**
SATUAN KERJA : 307509 **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/01/23 7:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
Tgl Data : 2/1/23 3:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,925,690,000	3,183,412,000	3,180,840,860	0	3,180,840,860	99.92	2,571,140
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,000	48,000	44,714	476	44,238	93.15	3,762
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	292,571,000	216,876,000	216,192,034	0	216,192,034	99.68	683,966
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	49,565,000	47,159,000	46,767,040	0	46,767,040	99.17	391,960
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	40,320,000	0	40,320,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,302,280,000	6,207,177,000	6,203,920,000	0	6,203,920,000	99.95	3,257,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,181,415,000	981,934,000	977,366,907	0	977,366,907	99.53	4,567,093
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	105,658,000	122,346,000	122,345,180	0	122,345,180	100	820
511129	Belanja Uang Makan PNS	357,720,000	467,720,000	467,693,000	0	467,693,000	99.99	27,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,630,000	19,100,000	19,100,000	365,000	18,735,000	100	365,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	324,000,000	368,550,000	368,550,000	0	368,550,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	10,586,882,000	11,654,642,000	11,643,139,735	365,476	11,642,774,259	99.9	11,867,741
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	10,586,882,000	11,654,642,000	11,643,139,735	365,476	11,642,774,259	99.9	11,867,741
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	759,171,000	756,492,000	756,491,799	0	756,491,799	100	201
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,698,000	641,000	641,000	0	641,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53,880,000	46,080,000	46,080,000	0	46,080,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,373,000	21,590,000	21,590,000	0	21,590,000	100	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,760,000	7,760,000	7,760,000	0	7,760,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	831,882,000	832,563,000	832,562,799	0	832,562,799	100	201
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4,453,000	4,453,000	0	4,453,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	4,453,000	4,453,000	0	4,453,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,540,000	39,530,000	39,529,700	0	39,529,700	100	300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	22,540,000	39,530,000	39,529,700	0	39,529,700	100	300
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	96,168,000	115,134,000	115,131,010	0	115,131,010	100	2,990
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	846,000	844,042	0	844,042	99.77	1,958
522113	Belanja Langganan Air	17,040,000	21,216,000	21,210,600	0	21,210,600	99.97	5,400
522141	Belanja Sewa	241,410,000	196,311,000	196,310,308	0	196,310,308	100	692

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1900 **BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN**
SATUAN KERJA : 307509 **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 02/01/23 7:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
Tgl Data : 2/1/23 3:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	547,000	547,000	0	547,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	367,018,000	334,054,000	334,042,960	0	334,042,960	100	11,040
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,218,000	321,961,000	321,960,600	0	321,960,600	100	400
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78,300,000	78,300,000	78,300,000	0	78,300,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,976,000	103,083,000	103,082,856	0	103,082,856	100	144
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	486,494,000	503,344,000	503,343,456	0	503,343,456	100	544
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	51,340,000	51,330,000	51,329,417	0	51,329,417	100	583
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,340,000	51,330,000	51,329,417	0	51,329,417	100	583
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,759,274,000	1,765,274,000	1,765,261,332	0	1,765,261,332	100	12,668
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118,000,000	118,000,000	117,992,000	0	117,992,000	99.99	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	118,000,000	118,000,000	117,992,000	0	117,992,000	99.99	8,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	118,000,000	118,000,000	117,992,000	0	117,992,000	99.99	8,000
	JUMLAH BELANJA	12,464,156,000	13,537,916,000	13,526,393,067	365,476	13,526,027,591	99.91	11,888,409

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 1900 **BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN**
SATUAN KERJA : 309076 **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 02/01/23 7:49 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --SAKTI
 Tgl Data : 2/1/23 3:01 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	959,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	959,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	316,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	867,000	867,000	867,000	0	867,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,183,000	867,000	867,000	0	867,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,891,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,891,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	70,000,000	70,000,000	69,968,000	0	69,968,000	99.95	32,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	70,000,000	70,000,000	69,968,000	0	69,968,000	99.95	32,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	38,880,000	39,196,000	39,195,870	0	39,195,870	100	130
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108,640,000	99,890,000	99,890,000	0	99,890,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	147,520,000	139,086,000	139,085,870	0	139,085,870	100	130
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	222,553,000	222,553,000	222,520,870	0	222,520,870	99.99	32,130
	JUMLAH BELANJA	222,553,000	222,553,000	222,520,870	0	222,520,870	99.99	32,130

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



DATA INVENTARIS

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KODE UAKPB : 005.01.1900.307509

Tanggal : 05-01-2023
Halaman : 1 dari 1

KODE	U R A I A N	N I L A I
117111	Barang Konsumsi	2,463,440
1.01.03.01.001	Alat Tulis	220,750
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	85,500
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	0
1.01.03.01.005	Buku Tulis	878,500
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	70,000
1.01.03.01.007	Penggaris	0
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	0
1.01.03.01.010	Alat Perekat	50,000
1.01.03.01.012	Staples	63,000
1.01.03.01.013	Isi Staples	5,250
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	113,000
1.01.03.02.001	Kertas HVS	662,000
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	15,540
1.01.03.02.004	Amplop	0
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	34,500
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	135,000
1.01.03.04.006	USB/Flash Disk	0
1.01.03.06.002	Lampu Listrik	0
1.01.03.06.010	Batu Baterai	130,400
1.01.03.09.001	Meterai	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	132,000
1.01.03.05.001	Sapu Dan Sikat	0
1.01.03.05.002	Alat-Alat Pel Dan Lap	72,000
1.01.03.05.003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	0
1.01.03.05.004	Keset Dan Tempat Sampah	0
1.01.03.05.008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	60,000
1.01.03.05.012	Pengharum Ruangan	0
1.01.03.05.999	Perabot Kantor Lainnya	0
Jumlah		2,595,440

Keterangan

- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang
- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi lainnya

Penanggung Jawab UAKPB

Muniroh Nahdi, S.H., M.H.

Petugas Pengelola Persediaan


Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 05-01-2023
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LBNST

NAMA UAKPB : 005.01.1900.307509 - PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	U R A I A N	
131111	Tanah	5,238,828,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,711,214,068
133111	Gedung dan Bangunan	7,779,656,000
134113	Jaringan	19,988,100
135121	Aset Tetap Lainnya	15,354,679
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,094,235,721)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(872,753,438)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,248,063)
J U M L A H		12,794,803,625



Penanggung Jawab UAKPB

Muniroh Nahdi, S.H., M.H.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tanggal : 05/01/23 11:00 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		4,816	5,238,828,000	0	0	84	0	4,732	5,238,828,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,308	1,406,704,000	0	0	0	0	1,308	1,406,704,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3,508	3,832,124,000	0	0	84	0	3,424	3,832,124,000
132111	Peralatan dan Mesin		500	2,336,452,318	42	391,755,900	1	1,350,000	541	2,726,858,218
3020101003	Station Wagon	Unit	2	337,314,828	0	0	0	0	2	337,314,828
3020104001	Sepeda Motor	Unit	8	117,710,000	0	0	0	0	8	117,710,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	69	182,498,200	0	0	0	0	69	182,498,200
3050104002	Lemari Kayu	Buah	6	8,450,000	0	0	0	0	6	8,450,000
3050104003	Rak Besi	Buah	1	3,795,000	0	0	0	0	1	3,795,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	2	150,000	0	0	0	0	2	150,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3050104007	Brandkas	Buah	2	15,250,000	0	0	0	0	2	15,250,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	4,500,000	0	0	0	0	5	4,500,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	60,000,000	0	0	0	0	1	60,000,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	15,240,000	0	0	0	0	4	15,240,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	1	27,450,500	0	0	0	0	1	27,450,500
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	64	164,400,600	0	0	0	0	64	164,400,600
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	155	150,352,300	6	4,410,000	0	0	161	154,762,300
3050201004	Kursi Kayu	Buah	12	11,400,000	0	0	0	0	12	11,400,000
3050201005	Sice	Buah	5	49,017,500	0	0	0	0	5	49,017,500
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	12,980,000	0	0	0	0	2	12,980,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	9,998,000	0	0	0	0	2	9,998,000
3050201017	Sketsel	Buah	2	8,745,000	0	0	0	0	2	8,745,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	7	13,332,500	0	0	0	0	7	13,332,500
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	1,800,000	0	0	0	0	1	1,800,000
3050204001	Lemari Es	Buah	9	12,500,000	0	0	1	1,350,000	8	11,150,000
3050204004	A.C. Split	Buah	19	97,648,000	0	0	0	0	19	97,648,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050206002	Televisi	Buah	6	34,910,000	0	0	0	0	6	34,910,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tanggal : 05/01/23 11:00 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	4	41,736,000	0	0	4	41,736,000
3050206008	Sound System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	0	0	7	3,846,150	0	0	7	3,846,150
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	45,000	0	0	0	0	2	45,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	68,000	0	0	0	0	2	68,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	1,080,000	0	0	0	0	6	1,080,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	2,992,000	0	0	0	0	1	2,992,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	3,248,400	0	0	0	0	6	3,248,400
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	14,000	0	0	0	0	2	14,000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	4,174,500	0	0	0	0	1	4,174,500
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050206060	Asbak Tinggi	Buah	4	2,000,000	0	0	0	0	4	2,000,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	1	2,155,620	0	0	1	2,155,620
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0	1	43,000	0	0	1	43,000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	0	0	1	16,483,500	0	0	1	16,483,500
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	30,136,000	1	1,034,520	0	0	7	31,170,520
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	0	0	1	10,644,900	0	0	1	10,644,900
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	25,518,900	0	0	1	25,518,900
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	22,495,000	0	0	0	0	1	22,495,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3060347002	Genset	Buah	1	149,985,000	0	0	0	0	1	149,985,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	dummy	1	17,840,000	0	0	0	0	1	17,840,000
3100102001	P.C Unit	Buah	19	196,117,600	13	215,923,310	0	0	32	412,040,910
3100102002	Lap Top	Buah	27	332,885,000	4	59,960,000	0	0	31	392,845,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	13,839,800	2	10,000,000	0	0	9	23,839,800
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	9,999,000	0	0	0	0	1	9,999,000
3100204001	Server	Buah	2	140,410,000	0	0	0	0	2	140,410,000
3100204002	Router	Buah	3	12,474,000	0	0	0	0	3	12,474,000
3100204014	Rak Server	Buah	2	18,226,590	0	0	0	0	2	18,226,590
3100204021	Kabel UTP	Buah	3	4,950,000	0	0	0	0	3	4,950,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	2	880,000	0	0	0	0	2	880,000
3100204024	Switch	Buah	6	4,950,000	0	0	0	0	6	4,950,000
133111	Gedung dan Bangunan		10	7,779,656,000	0	0	0	0	10	7,779,656,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	6,095,150,000	0	0	0	0	1	6,095,150,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tanggal : 05/01/23 11:00 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	2	517,731,000	0	0	0	0	2	517,731,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	44,702,000	0	0	0	0	2	44,702,000
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	109,033,000	0	0	0	0	1	109,033,000
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	720,981,000	0	0	0	0	3	720,981,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	292,059,000	0	0	0	0	1	292,059,000
134113	Jaringan		1	19,988,100	0	0	0	0	1	19,988,100
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	19,988,100	0	0	0	0	1	19,988,100
135121	Aset Tetap Lainnya		466	15,354,679	0	0	0	0	466	15,354,679
6010101001	Monografi	Buah	444	14,431,689	0	0	0	0	444	14,431,689
6010101002	Referensi	Buah	5	357,990	0	0	0	0	5	357,990
6010102002	Majalah	Buah	6	90,000	0	0	0	0	6	90,000
6010102004	Laporan	Buah	3	75,000	0	0	0	0	3	75,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	8	400,000	0	0	0	0	8	400,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		68	431,399,400	1	1,350,000	69	432,749,400	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	75,000	0	0	1	75,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	24,975,000	0	0	1	24,975,000	0	0
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	1	20,000	0	0	1	20,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	1,705,000	0	0	1	1,705,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	36	20,438,500	0	0	36	20,438,500	0	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	2,205,500	0	0	1	2,205,500	0	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	1	1,350,000	1	1,350,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	2	7,000,000	0	0	2	7,000,000	0	0
3050206008	Sound System	Buah	1	5,400,000	0	0	1	5,400,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	4,995,000	0	0	1	4,995,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,500,000	0	0	1	2,500,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	5	43,948,000	0	0	5	43,948,000	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	5	43,230,000	0	0	5	43,230,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	18,364,400	0	0	9	18,364,400	0	0
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	148,827,000	0	0	1	148,827,000	0	0
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	105,966,000	0	0	1	105,966,000	0	0
TOTAL				15,821,678,497		393,105,900		434,099,400		15,780,684,997

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



PERUBAHAN KEGIATAN ASESMEN APM



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570

Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 4095/DjA.3/HM.00/9/2022

5 Oktober 2022

Lampiran : -

Perihal : Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022

Yth :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
 4. Ketua Pengadilan Agama
- di -
Seluruh Indonesia

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI nomor 4046/DjA/OT.01.1/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyesuaian Anggaran Kegiatan Surveillance APM Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi serta hal lainnya sebagaimana yang dimaksud pada surat Direktur Jenderal nomor 3862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi.
2. Data/eviden yang telah di unggah oleh satuan kerja pada Aplikasi PMPAPMZI selanjutnya agar dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi peradilan ataupun sebagai bahan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
3. Untuk pelaksanaan tersebut angka 2 diatas, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menggunakan menu monitoring pada Aplikasi PMPAPMZI modul satker dengan login menggunakan user dan password Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah ada.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Direktur Jenderal

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



SK PETUGAS PTSP



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA
Nomor : W20-A2/109/OT.01.3/SK/IX/2022

T E N T A N G

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka perlu ditunjuk Pejabat pengelola, Penanggung jawab Pelaksanaan dan Petugas PTSP pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 1403b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR W20-A2/092/OT.00/V/2022 TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA;
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA sebagaimana tertuang dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 07 September 2022

Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA
 Nomor : W20-A2/109/OT.01.3/SK/IX/2022
 Tanggal : 07 September 2022

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam PTSP
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H	Ketua	Pengarah PTSP
2	Muhammad Surur, S.Ag.	Wakil Ketua	Pengarah PTSP
3	Drs. H. Rahmading, M.H.	Panitera	Penanggung Jawab PTSP
4	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab PTSP
5	Drs. H. Muh. Tang, M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang PTSP, Pelayanan Posbakum, E-Court dan E-Litigasi
6	Andi Suardi, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana PTSP
7	Hayad Jusa, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
8	Bintang, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP
9	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana PTSP
10	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Kasir
11	Fathur Razak, S.Sy.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Kasir
12	Metria Dwi Virahesti. A.Md. A.B.	CPNS Pengelola Perkara	Petugas PTSP Pendaftaran Perkara
13	Iriani, S.H.	Honorir	Petugas PTSP Pendaftaran Perkara
14	Zelvyana, S.H.	Honorir	Petugas PTSP Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
15	Hermawati, S.H.	Honorir	Petugas PTSP Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
16	Wahyuni Isfa Aulia A.Md.	CPNS Pengelola Perkara	Petugas PTSP Penyerahan Produk
17	Andi Ulfiyah Nur	Honorir	Petugas PTSP Penyerahan Produk
18	Dyta Nurul Yunus, S.H.	Honorir	Petugas PTSP Pojok Ecourt dan Pelayanan

19	Abdul Muhaemin, S.Fil	Honorar	Petugas PTSP Pojok Ecourt dan Pelayanan
20	Nurul Indryana Wahid, A.Md.A.B.	CPNS Pengelola Perkara	Petugas PTSP Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)
21	Imelda Machmud, S.H.	Honorar	Petugas PTSP Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)
22	Muhammad Haerul Huluk, S.H.I.	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
23	Ahmad Amiruddin, S.Sy.	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
24	M. Amin Firdaus, S.E.I	Honorar	Petugas Antrian
25	Petugas Security	Honorar	Petugas Antrian
26	Miarfina	Honorar	Petugas PTSP Duta Layanan
27	Sri Astuti Ana Darwis, S.H.	Honorar	Petugas PTSP Duta Layanan

Ditetapkan di : Watampone
 Pada tanggal : 07 September 2022
 Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA
Nomor : W20-A1/109/OT.01.3/SK/IX/2022
Tanggal : 07 September 2022

Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

PENGARAH PTSP

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Membentuk tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasi PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
2. Pengarah PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

PENANGGUNGJAWAB PTSP

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan Tanggungjawab :
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas PTSP.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone selaku Pengarah PTSP.

PELAKSANA PTSP

1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.
2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

PETUGAS PTSP

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;

- c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 07 September 2022
Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



SK HAKIM PENGAWAS BIDANG



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor: W20-A2/135 /PS.00/SK/XII/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan responentif Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Peradilan Agama Watampone;
 - b. Bahwa nama-nama Hakim pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diberi tugas Hakim Pengawas Bidang dimaksud di atas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan melekat;
 - 5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/1994 tentang Pola Pembinaan dan Penedalihan Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua

Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR: W20-A2/116/PS.00/SK/IX/2022 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;
- PERTAMA** : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone;
- KEDUA** : Tugas Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan seksama dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan;
- KETIGA** : Uraian tugas masing-masing Pengawas Bidang akan disusun sesuai lampiran;
1. Manajemen Peradilan :
 - a. Program Kerja
 - b. Pelaksanaan/pencapaian target
 - c. Pengawasan dan Pembinaan
 - d. Kendala dan hambatan
 - e. Faktor-faktor yang mendukung
 - f. Evaluasi kegiatan
 2. Administrasi Perkara :
 - a. Prosedur penerimaan perkara
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e. Keuangan perkara
 - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan
 - g. Pelaporan
 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

4. Administrasi Umum :
 - a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
 - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat
 - i. Pelaksanaan Tugas petugas PTSP

KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai Koordinator Pengawas;

KELIMA : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan rapat evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pengawas Bidang setiap triwulan. Selanjutnya mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone;

KEENAM : Koordinator dan Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone;

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 07 Desember 2022

Ketua,


Dra. Hj. Herivah, S.H., M.H.
NIP. 19671231 199303 2 018

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
 Nomor : W20-A2/135/PS.00/SK/XII/2022
 Tanggal : 07 Desember 2022
 Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Drs. H. Kamaluddin, S.H. NIP. 19580324 198703 1 004	Zelvyana
		Drs. H. M. Suyuti, M.H. NIP. 19571231 198103 1 069	Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Dra. Hj. Badriyah, S.H. NIP. 19581231 198203 2 021	Imelda Machmud
		Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	A. Achmad Husain
		Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H. NIP. 19580506 197803 1 001	Hamdany Asis
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. Nurmaali NIP. 19571231 199203 1 011	Sri Astuti Ana Darwis
		Drs. H. Idris, M.H.I. NIP. 19581231 198503 1 051	Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. NIP. 19621229 199103 2 004	A. Ulfiyah Nur
		Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	Satriani
		Dra. Hj. Sitti Amirah NIP. 19611002 198803 2 001	Ahmad Amiruddin
5.	Kinerja pelayanan publik	Drs. H. Muh. Tang, M.H. NIP. 19581231 198703 1 030	Dyta Nurul Yunus
		Drs. Abd. Rahman NIP. 19571231 199203 1 012	Iriani
		Dra. Hj. Warni, M.H. NIP. 19650727 199401 2 001	Hermawati

Ditetapkan di : Watampone
 Pada tanggal : 07 Desember 2022
 Ketua,


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
 NIP. 19671231 199303 2 018

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



FOTO - FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2022

1. APEL SENIN PAGI



2. APEL JUMAT SORE



3. UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL





4. PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD

